



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DP2KBP3A 2022**



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

KABUPATEN SUMBAWA

Alamat : Jln. Durian Nomor 75 Sumbawa Besar

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadapan tuhan Yang Maha Esa, karena Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dan dapat bermanfaat bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunan. sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna, namun setidaknya dapat memberikan gambaran tentang kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa.

Akhir kata kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja dimasa yang akan datang bagi Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa.

Sumbawa Besar, Februari 2023

Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa



JANNATULFALA, S.AP

NIP. 19640719 198503 2 005

Daftar Isi

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iii
Daftar Gambar		vi
Daftar Lampiran		vii
Ikhtisar eksekutif		viii
BAB I PENDAHULUAN		1
1.1 Latar Belakang		1
1.2 Struktur Organisasi Dinas P2KBP3A		2
1.3. Issu Strategis		9
BAB II PERENCANAAN KINERJA		10
2.1 Rencana Strategis Dinas P2KBP3A Tahun 2021-2026		10
2.2 Perjanjian Kinerja Dinas P2KBP3A Tahun 2021		12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		14
3.1. Capaian Kinerja Organisasi		16
3.2. Realisasi Anggaran		59
BAB IV PENUTUP		69
LAMPIRAN		

Daftar Tabel

Tabel 1.1.	Permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa -----	9
Tabel 2.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa -----	11
Tabel 2.2.	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa -----	12
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja Dinas P2KBP3A Tahun 2022 -----	13
Tabel 3.1	Kriteria Realisasi/Tingkat Capaian Kinerja -----	16
Tabel 3.2.	Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 --	17
Tabel 3.3.	Cascading Kinerja ISS-PD-1 Renstra Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa -----	18
Tabel 3.4.	Target dan Realisasi TFR tahun 2022 -----	20
Tabel 3.5.	Target dan Realisasi TFR Tahun 2020 – 2022 -----	21
Tabel 3.6.	Target akhir TFR dalam renstra dan Realisasi 2022 -----	21
Tabel 3.7.	Perbandingan Realisasi dengan Target Provinsi NTB -----	22
Tabel 3.8.	Perbandingan Realisasi dengan Target Nasional -----	22
Tabel 3.9.	Persentase Kebutuhan Ber-Kb Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) -----	24
Tabel 3.10.	Persentase Kebutuhan Ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Tahun 2017 – 2022 -----	24
Tabel 3.11.	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR) -----	25
Tabel 3.12.	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR) Tahun 2017 – 2022 -----	26
Tabel 3.13.	Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Sumbawa Tahun 2017-2022 -----	26
Tabel 3.14.	Efisiensi anggaran indikator TFR -----	27
Tabel 3.15.	Program/kegiatan yang menunjang indikator Angka Kelahiran Total (TFR) -----	28

Tabel 3.16. Target dan Realisasi Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera tahun 2022 -----	31
Tabel 3.17. Target dan Realisasi Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera tahun 2020 – 2022 -----	32
Tabel 3.18. Target akhir Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera dalam renstra dan realisasi tahun 2022 -----	32
Tabel 3.19. Data Keluarga Pra Sejahtera Tahun 2020 dan 2022 -----	34
Tabel 3.20. Capaian indikator kualitas keluarga -----	36
Tabel 3.21. Efisiensi anggaran indikator peningkatan keluarga Pra Sejahtera Tahun 2020 dan 2022 -----	36
Tabel 3.22. Program/kegiatan yang menunjang indikator peningkatan keluarga Pra Sejahtera Tahun 2020 dan 2022 -----	37
Tabel 3.23. Target dan Realisasi Nilai SAKIP DP2KBP3A Kab. Sumbawa -----	39
Tabel 3.24. Target dan Realisasi Nilai SAKIP DP2KBP3A Kab. Sumbawa Tahun 2020 – 2022 -----	40
Tabel 3.25. Target dan Realisasi Nilai SAKIP DP2KBP3A Kab. Sumbawa Tahun 2020 – 2022 -----	40
Tabel 3.26. Efisiensi anggaran indikator peningkatan Nilai SAKIP DP2KBP3A Kab. Sumbawa -----	42
Tabel 3.27. Program/kegiatan yang menunjang indikator peningkatan Nilai SAKIP DP2KBP3A Kab. Sumbawa -----	43
Tabel 3.28. Target dan realisasi Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD -----	45
Tabel 3.29. Target dan realisasi Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD tahun 2020 – 2022 -----	46
Tabel 3.30. Target akhir Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD dan realisasi 2022 -----	46
Tabel 3.31. Efisiensi anggaran indikator Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD -----	48

Tabel 3.32. Program kegiatan yang menunjang indikator Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD -----	49
Tabel 3.33. Target dan Realisasi Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak -----	52
Tabel 3.34. Target dan Realisasi Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak tahun 2020 – 2022 -----	52
Tabel 3.35. Target akhir Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak dalam renstra dan realisasi 2022 -----	53
Tabel 3.36. Nilai hasil pengukuran indikator KLA oleh KemenPPPA RI tahun 2022 -----	54
Tabel 3.37. Efisiensi anggaran indikator Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak -----	56
Tabel 3.38. Program kegiatan penunjang Indikator Kabupaten Layak Anak -----	57
Tabel 3.39. Ringkasan Realisasi Anggaran Tahun 2022 Berdasarkan DPPA) -----	59
Tabel 3.40. Tabel Rincian Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (berdasarkan PK) -----	60

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi UPT pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa	3
Gambar 1.2. Bagan Struktur Organisasi Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa	4

Daftar Lampiran

1. Surat Keputusan Kepala Dinas P2KBP3A Kab. Sumbawa Nomor 47 Tahun 2021 tentang IKU DP2KBP3A
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Perubahan
4. Perjanjian Kinerja Berjenjang
5. Capaian Perjanjian Kinerja tahun 2022
6. Rencana Kinerja Tahunan
7. Rencana Kinerja Tahunan Perubahan
8. Capaian Kinerja RKT Tahun 2022
9. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2022
10. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Perubahan Tahun 2022
11. Capaian Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2022
12. Matrik Hasil Pengukuran Kinerja Tahunan Tahun 2022
13. Capaian Kinerja Program / Kegiatan Tahun 2022
14. Logic Frame Work

Ikhtisar Eksekutif

Salah satu azas umum penyelenggaraan negara adalah akuntabilitas. Azas akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah yang dijalankan, dalam konteks penerapan tata pemerintahan yang baik mengisyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat/masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. lebih lanjut berdasarkan Perpres 29 tahun 2014 mengisyaratkan setiap instansi pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa ini disusun.

LKjIP Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa tahun 2022 ini menyajikan berbagai capaian kinerja sebagai kebutuhan untuk analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan. Capaian-capaian kinerja yang tergambar dari ukuran indikator-indikator kinerja sasaran sesungguhnya merupakan kinerja seluruh komponen pembangunan (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) sebagai bagian integral dari proses pembangunan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja 2022 Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa melaporkan capaian kinerja selama Tahun 2022 dikaitkan dengan Rencana Kinerja 2022 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis 2021-2026 Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa.

Sesuai dengan Rencana Kinerja 2022, selama periode ini Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa melaksanakan **80 Sub Kegiatan dalam 27 Kegiatan dan 10 Program** untuk memenuhi **5 sasaran strategis dengan 5 indikator sasaran strategis**. Untuk melaksanakan aktivitas ini disediakan anggaran sebesar Rp. 14.504.512.597,00 meliputi Belanja Pegawai Rp. 6.238.566.713,00; Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 7.428.959.384,00; dan Belanja Modal Rp. 836.986.500,00.

Baik secara parsial dan simultan hasil penilaian terhadap kinerja kegiatan menunjukkan bahwa capaian kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2022 berdasarkan tolok ukur dan target kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 dapat dikatakan berhasil.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap perangkat daerah diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, serta menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada kepala Pemerintah.

Sesuai dengan siklusnya, setelah berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran, perangkat daerah menyusun LKjIP yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukanlah dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), Renstra PD, Renja PD, PK, dan RKT.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberikan amanah. Dengan demikian LKjIP merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut.

Untuk memastikan keseluruhan program, dan kegiatan pembangunan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa dapat terlaksana sesuai dengan target waktu, Kuantitas dan kualitas sasaran, maka dibuatlah perjanjian antara kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa dengan Bupati, dan diturunkan secara berjenjang sampai dengan tingkat individu pegawai yang tertuang dalam

perjanjian kinerja. Sehingga Setiap penyelenggara negara dan pemerintah mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan, serta setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat / masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

1.2. Struktur Organisasi Dinas P2KBP3A

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, serta Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 23 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa.

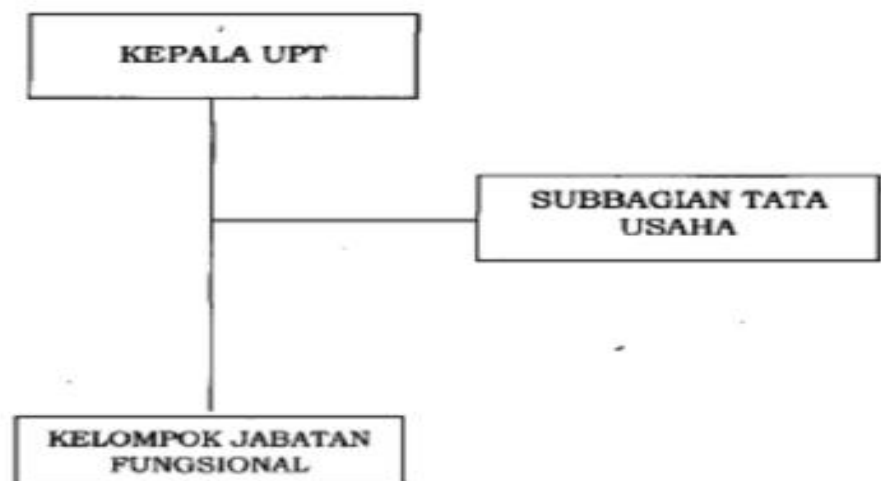
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan dua urusan pemerintahan yaitu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

A. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa terdiri atas:

1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas.
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat terdiri atas :
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan
 - kelompok jabatan fungsional yaitu :
 - a. Perencana Ahli Muda, dan
 - b. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
3. Unsur Pelaksana adalah Bidang terdiri atas:
 - a. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Penggerakan terdiri atas kelompok jabatan fungsional yaitu :
 - Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda.
 - b. Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri atas:
 - Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda.
 - c. Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga terdiri atas:
 - Analis Kebijakan Ahli Muda;
 - d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri atas:
 - Analis Kebijakan Ahli Muda;
 - e. Unit Pelaksanan Teknis (UPT) terdiri atas:
 - Unsur Pimpinan adalah Kepala UPT; dan
 - Unsur Pembantu Pimpinan adalah Subbagian Tata Usaha.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

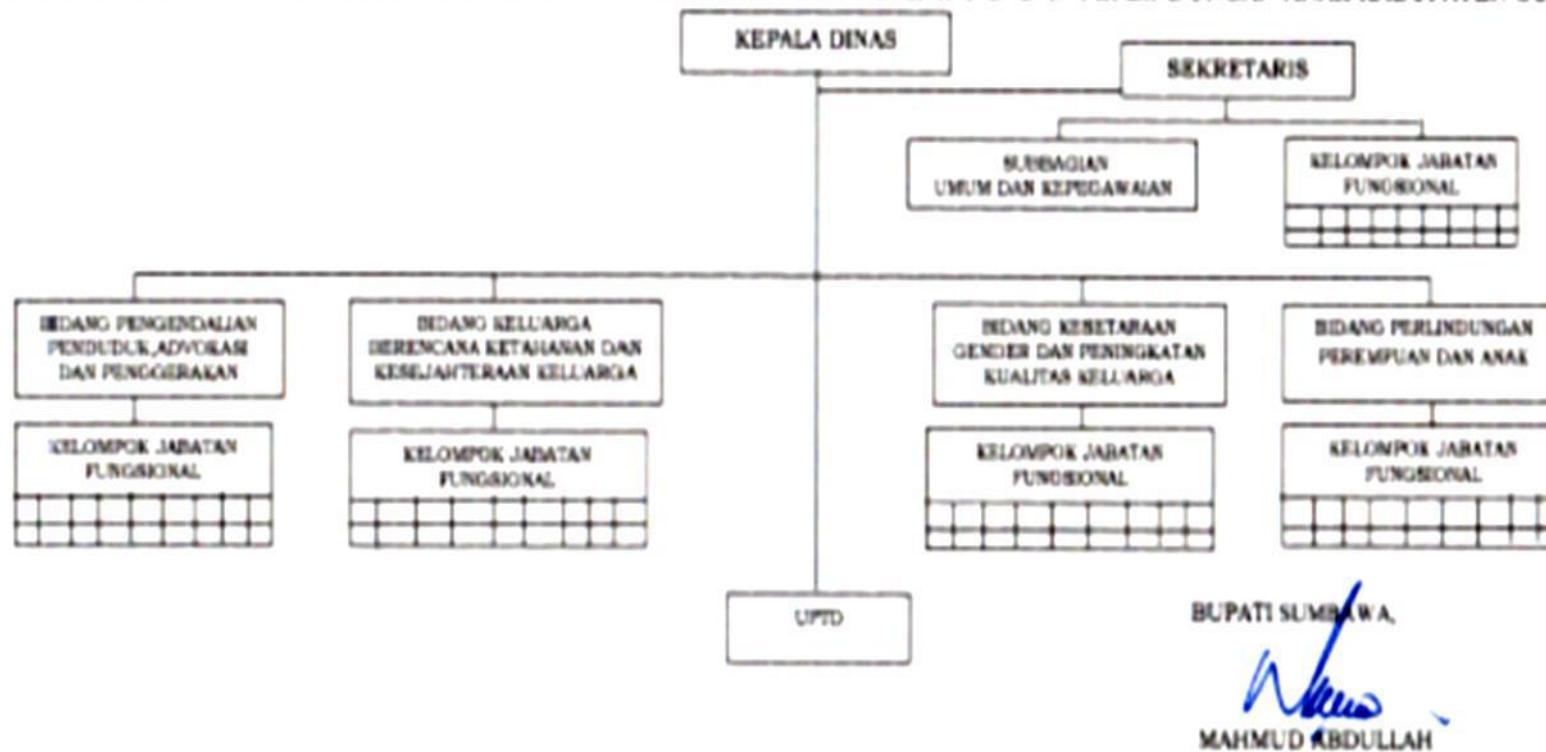
Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi UPT pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa



Gambar 1.2. Bagan Struktur Organisasi Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 63 TAHUN
2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SUMBAWA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMBAWA



B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan tugas pembantuan yang diberikan kepala Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Uraian tugas dan fungsi masing-masing dari sekretaris dan kepala bidang pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa diuraikan sebagai berikut :

1. Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian serta menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan;
2. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
3. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
4. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
5. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk serta menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian penduduk, data kependudukan serta advokasi dan penggerakan;
2. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk, data kependudukan serta advokasi dan penggerakan; dan
3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera serta menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi, jaminan pelayanan Keluarga Berencana, pembinaan kesertaan keluarga berencana, dan pemberdayaan keluarga sejahtera;
2. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi, jaminan pelayanan keluarga berencana, pembinaan kesertaan keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga sejahtera; dan
3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga

Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis kesetaraan gender dan peningkatan kualitas keluarga serta menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak;
2. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak;
3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak serta menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak;
2. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak;
3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Untuk meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten

Sumbawa, Adapun tugas dan fungsi unit pelaksana teknis berdasarkan peraturan bupati tersebut adalah sebagai berikut :

a. UPT KB dan PPPA

Tugas dari kepala unit pelaksana teknis KB dan PPPA melaksanakan pengendalian keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dalam melaksanakan tugas tersebut kepala unit pelaksana teknis keluarga berencana menyelenggarakan fungsi yaitu :

1. Penyusunan rencana kerja UPT Keluarga Berencana
2. Penyusunan bahan kebijakan teknis pengendalian keluarga berencana keluarga sejahtera
3. Penyusunan program dan kegiatan pengendalian keluarga berencana keluarga sejahtera
4. Penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pengendalian keluarga berencana keluarga sejahtera
5. Pelaksanaan kegiatan pengendalian keluarga berencana keluarga sejahtera
6. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan pengendalian keluarga berencana keluarga sejahtera
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

b. UPTD PPA

Tugas dari kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut kepala unit pelaksana teknis Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi yaitu :

1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPT perlindungan perempuan dan anak
2. Menyusun program kerja UPT perlindungan perempuan dan anak
3. Menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus
4. Mengevaluasi hasil kerja UPT perlindungan perempuan dan anak
5. Membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPT perlindungan perempuan dan anak

6. Melaksanakan administrasi UPT perlindungan perempuan dan anak
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

1.3. Isu Strategis

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa yang terkait dengan Pelayanan atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa serta factor-faktor yang mempengaruhinya disajikan sebagai berikut :

No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
1.	Pengendalian penduduk	1. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk tergantung dari pemerintah pusat	1. Kepadatan penduduk antar kecamatan belum proposional
2.	Keluarga Berencana	2. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	2. Masih kurangnya pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama dalam penyadaran masyarakat dalam peningkatan kualitas keluarga melalui program KB
3.	Keluarga Sejahtera	3. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	3. Belum semua peserta KB dari kelompok masyarakat miskin mendapat penguatan untuk peningkatan kesejahteraan
4.	Perlindungan perempuan dan anak	4. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan	4. Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak
5.	Kualitas keluarga,	5. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak	5. Masih rendahnya kualitas kesejahteraan keluarga dan kesetaraan gender
6.	Perlindungan khusus anak	6. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	6. Pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak masih rendah

Tabel 1.1. Permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, maka dirumuskan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun 2021-2026. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa diarahkan untuk mendukung dua (2) urusan yaitu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Rencana Strategis Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa merupakan perencanaan jangka menengah dan bersifat global yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro, operasional, dan berjangka pendek dalam satu tahunan berupa Rencana Kerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa.

2.1. Rencana Strategis Dinas P2KBP3A Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 73 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi Pembangunan Kabupaten Sumbawa 2021-2026, yaitu Terwujudnya Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban, yang dilaksanakan melalui 4 Misi yaitu : (1) Sumbawa Sehat dan Cerdas dengan Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daerah yang maju melalui peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan, (2) Sumbawa Sejahtera dan Mandiri dengan Mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan nilai tambah sektor agribisnis, industri dan pariwisata, (3) Sumbawa Bersih dan Melayani dengan Menciptakan birokrasi pemerintahan yang bersih (anti Korupsi), cepat dan bermutu, memberikan kepastian serta pelayanan yg cepat dan efisien, (4) Sumbawa Aman dan Berbudaya dengan Mewujudkan masyarakat

yang beriman, berkarakter, terlaksananya ketentraman dan ketertiban umum dan terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan.

a. Tujuan, Sasaran Jangka Menengah

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD, penentuan tujuan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa berfokus terhadap indikator sasaran daerah yang berkesesuaian dengan kewenangan dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa. Adapun tujuan dan sasaran Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa tahun 2021-2026 digambarkan dalam tabel berikut ini :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dengan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Indeks Kesehatan (AHH)
		Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)
			Peningkatan Jumlah Pengeluaran Perkapita (yang disesuaikan)
		Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera
			Persentase Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A
			Indeks Pembangunan Gender
		Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD
			Hasil Pengukuran Kabupaten Layak Anak
		Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa, maka selanjutnya dilaksanakan penentuan strategi dan arah kebijakan yang akan mengarahkan pada ketercapaian dari target yang telah ditentukan sebelumnya yang selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas kesehatan serta kualitas perempuan dan anak dengan peningkatan layanan pengendalian penduduk dan KB, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan peningkatan pelayanan KB Pasca Persalinan (KB PP)	Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR
	Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Penguatan Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera dan Peningkatan Kualitas Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program
	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Penguatan kebijakan dan regulasi	Meningkatkan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan
	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Penguatan kebijakan dan regulasi	Meningkatkan pemenuhan Hak anak melalui 5 Klaster KLA

Tabel 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa

2.2. Perjanjian Kinerja Dinas P2KBP3A Tahun 2022

Untuk dapat mengukur kinerja sebuah organisasi perlu ditetapkan target kinerja organisasi yang akan digunakan baik oleh para pelaksana dan pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi agar mencapai hasil atau berkinerja tinggi. Indikator kinerja ini dapat dijelaskan mulai dari pentingnya pengukuran kinerja sampai pada hal-hal yang rinci dalam mengelola organisasi secara umum agar berjalan efektif dan efisien.

Tahun 2022 merupakan tahun kedua RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2021-2026. Sesuai dengan target kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, maka Penetapan Kinerja pada Tahun 2022 adalah sebagaimana tabel berikut:

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	Persen	2.79
Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera	Persen	86.00
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A	Kategori Nilai	BB
Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD	Persen	11
Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Persen	8.27

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Dinas P2KBP3A Tahun 2022

Target kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2022 sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2022 yang merupakan target pencapaian organisasi Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa pada tahun kedua pencapaian Rencana Strategis 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pertama Tahun 2021-2026.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dapat didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Pengukuran terhadap suatu kinerja ditujukan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, sehingga menjadi suatu keharusan untuk menyusun menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terutama untuk mengetahui tingkat pencapaian suatu indikator kinerja instansi pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menjadi dasar dan pedoman yang digunakan untuk mengukur dan menyampaikan laporan kinerja Dinas P2BP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2022, yaitu dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja sasaran yang menjadi dasar penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022.

Capaian Kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa tahun 2022 diukur berdasarkan tingkat capaian pada masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berecana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berecana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa bahwa terdapat 5 sasaran strategis yang hendak dicapai, yaitu:

- 1). Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) dengan indikator kinerja utama yaitu Angka Kelahiran Total (TFR),
- 2). Meningkatnya persentase keluarga sejahtera dengan indikator kinerja utama adalah Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera,
- 3). Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja utama yaitu Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A,
- 4). Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah dengan indikator kinerja utama adalah Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD, dan
- 5). Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak dengan indikator kinerja utama adalah Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian kinerja yang semakin baik, rumus yang digunakan adalah :				
Persentase tingkat capaian	=	Realisasi Target	X	100 %
2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah capaian kinerja, rumus yang digunakan adalah :				
Persentase tingkat capaian	=	Target – (realisasi – target) Target	X	100 %

Kategori nilai realisasi dan capaian kinerja diinterpretasikan berdasarkan pengelompokan dalam skala ordinal, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:

Interval Nilai Realisasi Kinerja		Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Keterangan
1.	91 - ≤100	Sangat Tinggi	Pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja
2.	76 - ≤90	Tinggi	
3.	66 - ≤75	Sedang	Pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4.	51 - ≤65	Rendah	Pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan

Tabel 3.1 Kriteria Realisasi/Tingkat Capaian Kinerja

Sesuai amanat dan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menjadi pedoman dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah, dipersyaratkan bahwa informasi atau data tentang realisasi atau tingkat capaian suatu indikator harus berasal dari sumber yang dapat diakui dan dipercaya keabsahannya, baik dari sisi tata cara atau metode perhitungan dan dari sisi pihak yang melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian sampai dengan publikasinya.

Data atau informasi tentang capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 ini tidak hanya bersumber dari hasil pengukuran mandiri atau internal, namun juga bersumber dari Lembaga instansi eksternal yang berdasarkan suatu regulasi atau peraturan perundang-undangan tertentu memiliki kewenangan untuk mengumpulkan, mengolah sampai dengan menyajikan dan / atau mempublikasikan suatu data atau informasi tertentu kepada publik.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis. Adapun capaian sasaran strategis kinerja utama Dinas P2KBP3A pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	2.79	2.34	116.12
2	Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera	86.00	82.84	96.33
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A	BB	A	103,89%
4	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD	11.00	31.84	289.45
5	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	8.27	17.64	213.30

Tabel 3.2. Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, menetapkan 5 (tiga) indikator sasaran yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa dengan Bupati Sumbawa dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022. Pada masing-masing indikator sasaran strategis perangkat daerah, akan di disajikan nilai atau jumlah target, realisasi dan capaiannya, kendala atau hambatan, serta dukungan dan upaya dilakukan terhadap tingkat ketercapaian setiap indikator sesuai dengan sistematika yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun nomenklatur tujuan dan indikator tujuan, sasaran strategis dan indikator sasaran strategis serta program prioritas dan indikator outcome dari setiap program pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa yang mendukung upaya pencapaian target setiap sasaran strategis pada Tahun 2021, Berikut disajikan cascading atas sasaran dan indikator sasaran sebagai PK dalam tabel dibawah ini dalam :

Tujuan (T)	Sasaran Strategis (SS)	Program (P)	Indikator Kinerja Tujuan (IT), Indikator Sasaran Strategis (ISS), Indikator Kinerja Outcome (IP)	PD/Unit PD Pj.
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dengan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		1 Peningkatan Indeks Kesehatan	Kepala Dinas
	1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	1) Angka Kelahiran Total (TFR)	Kepala Dinas
		1 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1 Penurunan kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan
			2 Persentase capaian kinerja pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
		2 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	3 Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk	Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan
			2 Peningkatan Jumlah Pengeluaran Perkapita (yang disesuaikan)	Kepala Dinas
	2	Meningkatnya persentase keluarga sejahtera	2) Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera	Kepala Dinas
		3 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	4 Penurunan angka keluarga pra sejahtera	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
		4 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	5 Peningkatan pemenuhan indikator kualitas keluarga	Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
			3 Persentase Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi	Kepala Dinas
	3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	3) Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A	Kepala Dinas
		5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	6 Peningkatan nilai Sakip DP2KBP3A	Sekretariat Dinas P2KBP3A
			4 Indeks Pembangunan Gender	Kepala Dinas
	4	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	4) Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD	Kepala Dinas
		6 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	7 Peningkatan persentase PD yang menerapkan anggaran Responsif Gender Melalui APBD	Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga

Tujuan (T)		Sasaran Strategis (SS)		Program (P)		Indikator Kinerja Tujuan (IT), Indikator Sasaran Strategis (ISS), Indikator Kinerja Outcome (IP)		PD/Unit PD Pj.
						8	Peningkatan persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan pada sektor politik, ekonomi sosial dan budaya	Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
				7	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	9	Penurunan rasio kekerasan pada perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) yang ditangani	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
				8	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	10	Persentase capaian kinerja pengelolaan sistem data gender dan anak	Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
						5	Hasil Pengukuran Kabupaten Layak Anak	Kepala Dinas
		5	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak			5)	Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Kepala Dinas
				9	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	11	Penurunan persentase anak korban tindak kekerasan	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
				10	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	12	Peningkatan persentase Pemenuhan Indikator KLA	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Tabel 3.3. Cascading Kinerja ISS-PD-1 Renstra Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan tabel di atas, Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa memiliki 5 (lima) indikator sasaran strategis perangkat daerah untuk mencapai tujuan “Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dengan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi”. Tujuan tersebut memiliki 5 (lima) indikator tujuan seperti yang tertuang dalam tabel diatas, berikut diuraikan masing-masing capaian indikator sasaran dijabarkan dalam penjelasan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)

a. Definisi Operasional dan Tata Cara Pengukuran Kinerja

Sasaran Strategis Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) ini masuk dalam Misi Pertama RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 yaitu Sumbawa Sehat dan Cerdas, adapun indikator dari sasaran tersebut adalah Angka Kelahiran Total (TFR).

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, Angka Kelahiran Total (TFR) dihitung dengan formulasi:

$$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR$$

dimana:

TFR : Angka kelahiran total

ASFR_i : Angka kelahiran untuk perempuan pada kelompok umur *i*

i = 1 : Kelompok umur 20-24 tahun, ..., dan *i*=7 untuk kelompok umur 45-49 tahun.

Angka kelahiran total (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung atau rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya.

TFR merupakan pengukuran sintetis yang menyatakan fertilitas pada akhir masa reproduksi dari suatu kohor hipotetis perempuan. TFR dihitung dengan cara menjumlahkan angka kelahiran menurut umur (ASFR) kemudian dikalikan dengan interval kelompok umur (biasanya lima tahun).

b. Capaian Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan definisi diatas dilaporkan bahwa capaian kinerja indikator Angka Kelahiran Total (TFR) pada Tahun 2022 adalah 2.34 %

c. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria Capaian Kinerja 2022
Angka Kelahiran Total (TFR)	2,79	2.34	116,12	Sangat Tinggi

Tabel 3.4. Target dan Realisasi TFR tahun 2022

Berdasarkan penetapan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2022, diketahui bahwa indikator sasaran strategis Angka Kelahiran Total (TFR) memiliki target sebesar 2,79%, maka dengan realisasi sebesar 2.34% menjadikan capaian indikator sasaran strategis Angka Kelahiran Total (TFR) pada Tahun 2022 menjadi 116,12%.

Dengan capaian tersebut, maka nilai realisasi kinerja indikator sasaran strategis Angka Kelahiran Total (TFR) pada Tahun 2022 berada dalam interval nomor 1 dengan kriteria penilaian realisasi kinerja “sangat tinggi” karena pencapaian atau realisasi kinerja capaian telah melebihi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

- d. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2022 dengan Tahun sebelumnya

Angka Kelahiran Total (TFR)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Kriteria Capaian Kinerja
Tahun 2020		2,19%		
Tahun 2021	2,80%	1,99%	128,93%	Sangat Tinggi
Tahun 2022	2,79%	2,34%	116,12%	Sangat Tinggi

Tabel 3.5. Target dan Realisasi TFR Tahun 2020 – 2022

Sesuai dengan realisasi indikator sasaran strategis Angka Kelahiran Total (TFR) pada Tahun 2022, jika dibandingkan dengan Angka Kelahiran Total (TFR) pada tahun 2020 dan tahun 2021 yang diketahui masing sebesar 2,19% dan 1,99% sedangkan realisasi pada Tahun 2022 sebesar 2,34%, yang arti terjadi penurunan kinerja dari tahun 2020 sebesar 93,59% dan 85,04% dari tahun 2021. Namun demikian jika dibandingkan dengan target tahun 2022 capaian realisasi tersebut menggambarkan bahwa Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa telah berkinerja baik terhadap indikator sasaran strategis Angka Kelahiran Total (TFR).

- e. Perbandingan antara realisasi kinerja s.d. tahun n dengan target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Tahun II Renstra (2022)			Tahun Akhir Renstra (2026)		
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi 2022	Tingkat Capaian
1.	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,79	2.34	116,12%	2,76	2,34	115,22

Tabel 3.6. Target akhir TFR dalam renstra dan Realisasi 2022

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2021 tentang Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, diketahui bahwa pada periode akhir Restra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa (Tahun 2026), indikator sasaran strategis Angka

Kelahiran Total (TFR) memiliki target sebesar 2,76%, maka dengan realisasi sebesar 2.34% menjadikan capaian indikator Angka Kelahiran Total (TFR) pada Tahun 2022 berbading dengan target periode akhir Restra Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa menjadi 115,22%.

- f. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2022 dengan standar provinsi dan Nasional (jika ada)

Indikator Angka Kelahiran Total (TFR) juga merupakan indikator kinerja pengendalian penduduk secara nasional, BKKBN Perwakilan NTB menargetkan TFR provinsi NTB pada Tahun 2022 adalah sebesar 2,29%, sedangkan BKKBN menargetkan Angka Kelahiran Total (TFR) nasional sebesar 2.21% pada tahun 2022, Secara lengkap perbandingan capaian Kabupaten Sumbawa terhadap Angka Kelahiran Total (TFR) Provinsi NTB dan Nasional disajikan pada Tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Target Kab. Sumbawa	Realisasi Kab. Sumbawa	Proporsi (%)	Target Provinsi NTB 2022	Realisasi Provinsi NTB 2022	Proporsi (%)
1.	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,79	2.34	116,12	2.29	2.43	94,24%

Tabel 3.7. Perbandingan Realisasi dengan Target Provinsi NTB

No	Indikator Kinerja	Target Kab. Sumbawa	Realisasi Kab. Sumbawa	Proporsi (%)	Target Nasional 2022	Realisasi Nasional 2022	Proporsi (%)
1.	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,79	2.34	116,12	2.21	2.21	100

Tabel 3.8. Perbandingan Realisasi dengan Target Nasional

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Angka Kelahiran Total (TFR) Kabupaten Sumbawa telah melewati Angka Kelahiran Total (TFR) Provinsi sedangkan untuk Nasional masih berada dibawah angka capaian nasional.

- g. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Secara umum pada kurun waktu tertentu angka fertilitas/kelahiran cenderung bersifat fluktuatif/berubah ubah. Hal ini menunjukkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi pengendalian angka kelahiran atau fertilitas, meskipun pemakaian kontrasepsi bukan satu-satunya faktor yang langsung

berpengaruh, tetapi diyakini bahwa faktor ini memberikan kontribusi terbesar terhadap penurunan fertilitas. Selain itu, faktor sosial lainnya seperti tingkat pendidikan, migrasi dan lainnya yang berpengaruh terhadap TFR juga perlu menjadi perhatian.

Selain penggunaan alat kontrasepsi Penurunan angka kelahiran juga dipengaruhi oleh penundaan usia perkawinan, proporsi usia pernikahan muda yang tinggi memungkinkan mempunyai anak yang banyak dikarenakan panjangnya masa reproduksi, tetapi dengan menunda usia pernikahan misalnya pada usia 30 tahun hanya akan menghasilkan paling banyak 3 anak dengan menggunakan kontrasepsi, hal ini dipengaruhi oleh keberadaan 392 TPK pada 165 desa/kelurahan, yang bertugas mendampingi dan mengedukasi PUS untuk menjaga jarak kehamilan.

Namun banyak pasangan yang telah menunda pernikahannya mempercepat laju (mempersingkat interval antara kelahiran) dalam rangka untuk menebus waktu yang hilang. Dengan demikian, penundaan perkawinan cenderung menyebabkan penurunan dalam kesuburan, itu saja tidak bisa membawa ke tingkat fertilitas rendah. Berikut diuraikan capaian dari komponen pendukung Angka Kelahiran Total (TFR).

1. Penurunan kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)

Kebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenuhi (unmet need) didefinisikan sebagai 1. Persentase PUS yang tidak ingin mempunyai anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara KB (Statistik Rutin) dan 2. Wanita usia subur yang tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi namun menginginkan penundaan kehamilan (penjarangan) atau berhenti sama sekali (pembatasan)

Berdasarkan data F1 DALAP, realisasi kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) di Kabupaten Sumbawa sebesar 18,88% jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 14,80%, yang artinya capaian tersebut masih dibawah dari target atau tercapai sebesar 78,39%. Berikut disajikan data kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2022 pada table di bawah ini.

NO	KECAMATAN	JUMLAH PUS	INGIN ANAK DITUNDA		TIDAK INGIN ANAK LAGI		JUMLAH Unmet Need	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	LUNYUK	3,470	256	7.38	212	6.11	468	13.49
2	ALAS	4,292	679	15.82	738	17.19	1,417	33.01
3	UTAN	5,329	525	9.85	541	10.15	1,066	20.00
4	BATU LANTEH	1,469	108	7.35	140	9.53	248	16.88
5	SUMBAWA	6,683	589	8.81	881	13.18	1,470	22.00
6	MOYO HILIR	4,172	250	5.99	365	8.75	615	14.74
7	MOYO HULU	3,792	298	7.86	396	10.44	694	18.30
8	ROPANG	908	25	2.75	54	5.95	79	8.70
9	LAPE	2,754	133	4.83	289	10.49	422	15.32
10	PLAMPANG	5,210	267	5.12	534	10.25	801	15.37
11	EMPANG	3,804	188	4.94	398	10.46	586	15.40
12	ALAS BARAT	3,705	518	13.98	406	10.96	924	24.94
13	LABUHAN BADAS	4,669	319	6.83	561	12.02	880	18.85
14	LABANGKA	2,352	116	4.93	163	6.93	279	11.86
15	BUER	2,176	286	13.14	476	21.88	762	35.02
16	RHEE	1,315	97	7.38	185	14.07	282	21.44
17	UNTER IWES	3,420	249	7.28	423	12.37	672	19.65
18	MOYO UTARA	1,964	119	6.06	154	7.84	273	13.90
19	MARONGE	1,547	76	4.91	178	11.51	254	16.42
20	TARANO	3,226	190	5.89	332	10.29	522	16.18
21	LOPOK	2,979	150	5.04	364	12.22	514	17.25
22	LENANGGUAR	1,445	91	6.30	134	9.27	225	15.57
23	ORONG TELU	603	15	2.49	39	6.47	54	8.96
24	LANTUNG	603	33	5.47	34	5.64	67	11.11
	Jumlah	71,887	5,577	7.76	7,997	11.12	13,574	18.88

Tabel 3.9. Persentase Kebutuhan Ber-Kb Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)

Berdasarkan data capaian 5 tahun ke belakang, Perkembangan persentase realisasi kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) dari tahun 2017 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada table berikut :

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Kebutuhan Ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	11,52	11,00	10,34	10,34	8,96	18,88

Tabel 3.10. Persentase Kebutuhan Ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Tahun 2017 – 2022

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan kinerja pada tahun 2022 dari tahun 2021 yang sangat tajam, dimana angka kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) secara persentase meningkat secara drastis dari angka 8,96% menjadi 18,88%.

2. Persentase capaian kinerja pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)

Persentase pemakaian kontrasepsi cara modern adalah persentase pasangan usia subur (PUS) yaitu pasangan suami istri berstatus kawin, istrinya berusia 15-49 tahun, yang sedang menggunakan alat/cara KB modern berupa sterilisasi wanita (MOW), sterilisasi pria (MOP), Pil, IUD, Suntik, Susuk KB (Implant) dan kondom. Pengukuran CPR cara modern (persen) ini dilakukan dengan membandingkan jumlah perempuan yang berstatus kawin usia 15-49 tahun yang sedang menggunakan alat/cara KB modern dengan jumlah perempuan usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.

Adapun realisasi pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) di Kabupaten Sumbawa yaitu mencapai 67,78%, angka ini telah melampaui dari target sebesar 64% atau sebesar 105,91%. Secara lengkap dapat dilihat pada table di bawah ini.

NO	KECAMATAN	PUS	JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT METODE KONTRASEPSI							JUMLAH PESERTA KB AKTIF	% Terhadap PUS
			IUD	MOW	MOP	KONDOM	IMPLAN	SUNTIKAN	PIL		
1	LUNYUK	3,470	114	17	1	5	1,147	1268	71	2,623	75.59
2	ALAS	4,292	231	76	6	6	519	1356	98	2,292	53.40
3	UTAN	5,329	255	74	-	9	988	1866	129	3,321	62.32
4	BATU LANTEH	1,469	10	8	-	2	279	696	27	1,022	69.57
5	SUMBAWA	6,683	1,118	153	7	27	691	2056	174	4,226	63.24
6	MOYO HILIR	4,172	198	96	6	9	644	1998	158	3,109	74.52
7	MOYO HULU	3,792	444	60	2	25	779	1157	142	2,609	68.80
8	ROPANG	908	87	8	-	0	113	516	20	744	81.94
9	LAPE	2,754	231	36	-	3	532	1207	57	2,066	75.02
10	PLAMPANG	5,210	365	60	11	7	615	2455	240	3,753	72.03
11	EMPANG	3,804	445	110	2	13	842	1244	80	2,736	71.92
12	ALAS BARAT	3,705	115	78	5	8	553	1188	210	2,157	58.22
13	LABUHAN BADAS	4,669	423	100	8	9	759	1678	122	3,099	66.37
14	LABANGKA	2,352	57	11	2	3	331	1336	36	1,776	75.51
15	BUER	2,176	71	48	-	1	221	719	69	1,129	51.88
16	RHEE	1,315	41	18	-	0	222	550	15	846	64.33
17	UNTER IWES	3,420	446	77	1	16	629	1011	129	2,309	67.51
18	MOYO UTARA	1,964	146	62	-	11	299	708	188	1,414	72.00
19	MARONGE	1,547	158	30	-	2	189	627	97	1,103	71.30
20	TARANO	3,226	112	65	6	8	615	1431	80	2,317	71.82
21	LOPOK	2,979	276	49	1	5	739	851	143	2,064	69.28
22	LENANGGUAR	1,445	126	12	2	2	473	385	22	1,022	70.73
23	ORONG TELU	603	8	-	-	0	99	393	8	508	84.25
24	LANTUNG	603	42	10	30	1	216	177	6	482	79.93
JUMLAH		71,887	5,519	1,258	90	172	12,494	26,873	2,321	48,727	67.78

Tabel 3.11. Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)

Berikut disajikan capaian Persentase pemakaian kontrasepsi cara modern dari tahun 2017 hingga 2022 seperti yang terlihat pada table berikut :

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate / MCPR)	79,80	79,07	80,28	80,19	81,98	67,78

Tabel 3.12. Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR) Tahun 2017 – 2022

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian pemakaian kontrasepsi cara modern di Kabupaten Sumbawa dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan dari angka 81,98% pada tahun 2021 menjadi 67,78% pada tahun 2022.

3. Laju Pertumbuhan Penduduk

Fakta bahwa tren jumlah penduduk cenderung meningkat setiap tahunnya merupakan sesuatu yang harus dikawal agar peningkatan tersebut tetap terkendali dan terencana sehingga mampu mengarahkan pembangunan menjadi lebih baik. Berdasarkan Proyeksi Penduduk Sensus Penduduk (SP) 2010, jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2019 berjumlah 457.671 jiwa, kemudian terus meningkat menjadi 527.607 jiwa pada Tahun 2022. Selama Tahun 2019-2022, laju pertumbuhan penduduk selalu positif. Artinya, selalu ada peningkatan jumlah penduduk di setiap tahunnya. Pada Tahun 2022, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sumbawa sebesar 1,90 persen. Laju pertumbuhan yang cukup ekstrem di Tahun 2020 terjadi karena adanya perbedaan metodologi dalam penghitungan jumlah penduduk. Berikut disajikan data laju pertumbuhan penduduk di kabupaten Sumbawa :

No	Uraian	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
	Jumlah Penduduk (jiwa)	457.671	509.753	517.777	527.607
	Laju Pertumbuhan (%)	0,88	11,30	1,62	1,90

Tabel 3.13. Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2022

h. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, secara terus menerus di tata ulang agar siap pakai terutama ketika terjadi suatu perubahan agar tetap dapat beroperasi dan selalu dapat menghasilkan daya guna atau manfaat yang lebih tinggi atau semakin baik.

Memperhatikan konsepsi di atas, maka berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, yang dalam penyajian ini diutamakan pada efisiensi penggunaan anggaran. Sementara sumber daya berupa sumber daya manusia, metode (SOP), peralatan dan perlengkapan (machine), bahan baku (material) dan informasi tidak dianalisis secara khusus.

Analisis atas efisiensi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) dengan indikator Angka Kelahiran Total (TFR) pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2022	Pagu Indikatif Renstra Tahun 2022 (Rp juta)	Pagu DPA TA. 2022 (Rp juta)	Pagu DPPA TA. 2022 (Rp juta)	Realisasi Anggaran (Rp juta)	Capaian Realisasi Anggaran
Angka Kelahiran Total (TFR)	2,34	5.799	4.297	4.768	4.505	94,50

Tabel 3.14. Efisiensi anggaran pada indikator Angka Kelahiran Total (TFR)

Berdasarkan tabel di atas, maka upaya pencapaian target indikator Angka Kelahiran Total (TFR) telah dilakukan dengan sangat baik yang ditunjukkan oleh capaian kinerja sebesar 2,34% dengan jumlah capaian realisasi anggaran berdasarkan anggaran dalam DPPA TA. 2022 sebesar 94,50%, namun jika jumlah realisasi anggaran pada Tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan pagu indikatif dalam Renstra Tahun 2022, maka capaian anggaran yang direalisasikan TA. 2022 hanya sebesar 77,70%.

Maka diketahui bahwa indikator Angka Kelahiran Total (TFR) berkinerja sebesar 2.34% dengan menggunakan anggaran sebesar 94,50% dari jumlah anggaran dalam DPPA Tahun 2022 dan sebesar 77,70% dari pagu indikatif Tahun 2022 dalam Renstra. Hal ini merupakan salah satu bentuk efisiensi atas anggaran, karena jumlah target indikator Angka Kelahiran Total (TFR) yang ditetapkan dalam Renstra tidak dilakukan penyesuaian akibat perubahan anggaran pada Tahun 2022 sebagai salah satu input utama.

i. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022, diketahui bahwa indikator Angka Kelahiran Total (TFR) memiliki target sebesar 2,79%, dan hasil pengukuran terhadap indikator Angka Kelahiran Total (TFR) Tahun 2022 juga tercapai sebesar 2,34%, sehingga berkinerja sebesar 116,12%. Pada Tahun 2022, telah dilaksanakan sejumlah program yang diikuti oleh kegiatan dan sub kegiatannya. Realisasi target kinerja keluaran di level kegiatan dan sub kegiatan berkontribusi dan mempengaruhi tingkat capaian indikator Angka Kelahiran Total (TFR). Kegiatan dan Sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 tersebut diketahui ada terealisasi sesuai dengan target, ada yang tidak mencapai target dan ada juga yang melebihi target, sebagai berikut:

No.	Program / Kegiatan	Idikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Penurunan kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	14.80	18.88	78.39
		Persentase capaian kinerja pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	64.00	67.78	105.91
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	100.00	82.69	82.69
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah pelaksanaan rakor bersama mitra	1.00	1.00	100.00
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah KIE yang sesuai dengan kearifan budaya lokal	3.00	3.00	100.00
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah media massa cetak yang terlibat dalam KIE Program KKBPK	2.00	2.00	100.00
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Anggota POKJA kampung KB yang terlibat dalam mekanisme operasional program KKBPK	216.00	216.00	100.00
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai Penyuluhan yang mendapatkan dana operasional	24.00	24.00	100.00
	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah pelaksanaan audit kasus stunting	2.00	2.00	100.00
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	34.00	34.00	100.00
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah OPD yang melakukan intervensi pembangunan kampung KB	10.00	12.00	120.00
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	12.00	12.00	100.00

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penurunan Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	71.16	50.30	141.47
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader PPKBD dan Sub PPKBD yang melaksanakan penyuluhan penggerakan pelayanan dan pengembangan program KKBPK	960.00	960.00	100.00
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100.00	100.00	100.00
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Faskes teregister yang mendapat ketersediaan atau distribusi alat dan obat kontrasepsi	39.00	39.00	100.00
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	42.74	26.93	63.01
	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah kasus kegagalan penggunaan MKJP yang ditangani	4.00	4.00	100.00
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Sarana penunjang pelayanan KB	5.00	2.00	40.00
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	84.43	100.00	118.44
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)	28.71	27.34	95.23
	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor KB Pria yang dilayani	10.00	-	0.00
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk	1.93	1.90	101.58
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah dokumen kebijakan pengendalian kualitas penduduk	2.00	2.00	100.00
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	1.00	1.00	100.00
	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Laporan pelaksanaan sarasehan hasil pemutakhiran data	1.00	1.00	100.00
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	16.00	16.00	100.00
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah laporan pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1.00	1.00	100.00
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah dokumen data dan informasi keluarga	1.00	1.00	100.00
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah dokumen pencatatan dan pengumpulan data keluarga	1.00	1.00	100.00
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	12.00	12.00	100.00
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	1.00	1.00	100.00

Tabel 3.15. Program/kegiatan yang menunjang indikator Angka Kelahiran Total (TFR)

Berdasarkan tabel diatas, target indikator kinerja program yang tercapai dan bahkan melebihi target. Hal ini dapat dijelaskan bahwa capaian tersebut dipengaruhi oleh optimalnya pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan dalam program terkait, sehingga ketercapaian dari keluaran di level kegiatan dan sub kegiatan dalam masing-masing program mempengaruhi capaian kinerja outcome. Namun terdapat target indikator kinerja sub kegiatan yang tidak tercapai. Berikut akan dijelaskan penyebab dari tidak tercapainya target kinerja sub kegiatan serta upaya yang telah dilakukan, yaitu:

1. Masih banyak perempuan bekerja yang tidak ingin punya anak tapi tidak ingin ber-KB karena merasa tidak cocok (kurang nyaman) dengan alat kontrasepsi.
2. Kesadaran pria untuk ber KB masih kurang, sehingga target yang telah ditetapkan tidak tercapai bahkan tidak terlaksana. Ditambah lagi dengan kekurangan tenaga medis yang mendukung pelayanan untuk pemasangan alat kontrasepsi untuk pria (MOP)

Upaya yang telah dilakukan adalah dengan mengoptimalkan peran 392 TPK pada 165 desa/kelurahan, yang bertugas mendampingi dan mengedukasi PUS untuk menjaga jarak kehamilan.

2. Sasaran Strategis Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera

a. Definisi Operasional dan Tata Cara Pengukuran Kinerja

Sasaran strategis meningkatnya persentase keluarga sejahtera ini masuk dalam Misi Kedua RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 yaitu Sumbawa Sejahtera dan Mandiri, adapun indikator dari sasaran tersebut adalah Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera dihitung dengan formulasi:

Persentase Keluarga Sejahtera	$\frac{\text{Jumlah Keluarga Sejahtera}}{\text{Jumlah Keluarga (KK)}}$	X 100
--------------------------------------	--	--------------

Tujuan akhir dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sejahtera merupakan keadaan sentosa dan makmur yang diartikan sebagai keadaan yang berkecukupan atau tidak kekurangan. Kesejahteraan bukan perkara ekonomi saja, melainkan juga sosial, budaya, potensi wilayah, dan hal lainnya yang dapat mejadi faktor penentu kesejahteraan. Pembangunan berkelanjutan yang meliputi semua aspek tersebut sangat dibutuhkan sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya. Strategi pembangunan ditekankan pada perbaikan kualitas hidup masyarakat dan sekaligus ditujukan pula untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai. Namun, implementasinya aspek ekonomi cenderung mendapatkan prioritas yang lebih besar dibandingkan aspek pembangunan manusia.

b. Capaian Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan definisi diatas dilaporkan bahwa capaian kinerja indikator Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera pada Tahun 2022 adalah 82,84%

c. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria Capaian Kinerja 2022
Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera	86,00	82,84	96,33	Sangat Tinggi

Tabel 3.16. Target dan Realisasi Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera tahun 2022

Berdasarkan penetapan Perjanjian Kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2022, diketahui bahwa indikator Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera memiliki target sebesar 86,00%, maka dengan realisasi sebesar 82,84% menjadikan capaian indikator Peningkatan Persentase Keluarga pada Tahun 2022 menjadi 96,33. Dengan capaian tersebut, maka nilai realisasi kinerja indikator Peningkatan Persentase Keluarga pada Tahun 2022 berada dalam interval nomor 1 dengan kriteria penilaian realisasi kinerja “sangat tinggi” karena pencapaian atau realisasi kinerja berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

- d. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2022 dengan Tahun sebelumnya

Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Kriteria Capaian Kinerja
Tahun 2020		82,19%		
Tahun 2021	85,00%	92,15%	108,41%	Sangat Tinggi
Tahun 2022	86,00%	82,84	96,33	Sangat Tinggi

Tabel 3.17. Target dan Realisasi Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera tahun 2020 - 2022

Sesuai dengan realisasi indikator Peningkatan Persentase Keluarga pada Tahun 2022, jika dibandingkan dengan data pada tahun 2021 angka keluarga sejahtera diketahui sebesar 92,15% dan realisasi pada Tahun 2022 sebesar 82,84% Capaian nilai realisasi tersebut menggambarkan adanya penurunan kinerja dari tahun 2021 namun masih dalam kategori berkinerja baik terhadap indikator Peningkatan Persentase Keluarga.

- e. Perbandingan antara realisasi kinerja s.d. tahun n dengan target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Tahun II Renstra (2022)			Tahun Akhir Renstra (2026)		
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi 2021	Tingkat Capaian
1.	Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera	86,00%	82,84	96,33	89%	82,84%	93,08%

Tabel 3.18. Target akhir Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera dalam renstra dan realisasi tahun 2022

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2021 tentang Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, diketahui bahwa pada periode akhir Restra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa (Tahun 2026), indikator Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera memiliki target sebesar 89%, maka dengan realisasi sebesar 82,84% menjadikan capaian indikator Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera pada Tahun 2022 berbading dengan target periode akhir Restra Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa menjadi 93,08%.

f. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2022 dengan standar provinsi dan Nasional (jika ada)

Tidak dilakukan perbandingan terhadap realisasi kinerja Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera Tahun 2022 dengan standar provinsi dan nasional, karena indikator kinerja tersebut tidak ditemukan di tingkat provinsi maupun nasional.

g. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Proses pembangunan adalah usaha masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, tidak saja berupa kebutuhan fisik, seperti: makanan, pakaian, dan perumahan, tetapi juga kebutuhan non fisik, seperti: pendidikan, keamanan, hiburan, status sosial, dan kesempatan kerja. Untuk mempercepat terpenuhinya kebutuhan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan berbagai program di berbagai bidang yang strategis, seperti: kesehatan, pendidikan, juga perumahan. Diperlukan perencanaan sekaligus monitoring dan evaluasi yang cermat dan terarah sehingga terlihat sejauh mana pembangunan telah berdampak dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, dalam program pembangunan berikutnya dapat dilakukan perbaikan sekaligus penyempurnaan sehingga dapat lebih optimal.

Capaian indikator Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera yang disajikan diatas di dukung oleh dua komponen penyusun indikator, yaitu Penurunan angka keluarga pra sejahtera dan Peningkatan pemenuhan indikator kualitas keluarga. Kedua indikator pendukung tersebut terlaksana dengan baik dan mencapai target yang telah ditetapkan. Secara lengkap capaian dari indikator pendukung tersebut disajikan sebagai berikut :

1. Penurunan angka keluarga pra sejahtera

Upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka keluarga pra sejahtera adalah dengan pelaksanaan KIE terkait KB/KR yang salah satu sub kegiatannya adalah pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang bertujuan untuk meningkatkan akses ekonomi keluarga yang berkualitas dan dengan peningkatan peran serta masyarakat dalam program KB/KR yang mandiri melalui pemberdayaan institusi masyarakat Pedesaan (IMP). optimalnya pelaksanaan

KIE, penyuluhan dan pendampingan oleh Kelompok PIK R dalam mengedukasi remaja agar tidak menikah pada usia muda.

Dengan adanya PPKS disetiap kecamatan dapat memberi dampak terhadap pencapaian indikator penurunan angka keluarga pra sejahtera, adapun data keluarga pra sejahtera pada tahun 2022 dari hasil pemuktahitran pendataan keluarga yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		JUMLAH KK	PRA SEJAHTERA	% PRA SEJAHTERA	JUMLAH KK	PRA SEJAHTERA	% PRA SEJAHTERA	JUMLAH KK	PRA SEJAHTERA	% PRA SEJAHTERA
1	LUNYUK	5,874	1,521	25.89	5,199	474	9.12	6,891	1,453	21.09
2	ALAS	8,405	1,715	20.40	7,952	876	11.02	10,354	2,606	25.17
3	UTAN	9,216	1,562	16.95	9,260	855	9.23	11,452	1,432	12.50
4	BATULANTEH	2,957	2,081	70.38	2,444	201	8.22	3,674	1,289	35.08
5	SUMBAWA	15,161	2,549	16.81	12,436	567	4.56	19,834	601	3.03
6	MOYO HILIR	7,522	1,017	13.52	7,437	416	5.59	9,270	673	7.26
7	MOYO HULU	7,010	776	11.07	6,845	481	7.03	8,307	1,564	18.83
8	ROPANG	1,718	368	21.42	1,355	57	4.21	2,102	612	29.12
9	LAPE	5,036	417	8.28	4,339	256	5.90	6,214	142	2.29
10	PLAMPANG	8,761	537	6.13	7,874	591	7.51	10,725	2,183	20.35
11	EMPANG	6,885	1,509	21.92	6,874	405	5.89	8,371	2,436	29.10
12	ALAS BARAT	6,851	503	7.34	6,774	366	5.40	8,022	868	10.82
13	LAB. BADAS	8,543	800	9.36	6,938	728	10.49	11,373	1,401	12.32
14	LABANGKA	3,722	708	19.02	3,643	529	14.52	4,371	1,294	29.60
15	BUER	4,366	746	17.09	4,180	215	5.14	5,431	1,610	29.64
16	RHEE	2,149	389	18.10	2,080	122	5.87	2,830	1,637	57.84
17	UNTER IWES	5,955	784	13.17	5,759	308	5.35	7,566	244	3.22
18	MOYO UTARA	3,234	1,013	31.32	3,235	158	4.88	3,825	236	6.17
19	MARONGE	2,675	919	34.36	2,644	280	10.59	3,879	819	21.11
20	TARANO	4,894	1,820	37.19	4,847	483	9.96	5,807	2,456	42.29
21	ORONG TELU	5,527	357	6.46	5,514	746	13.53	1,700	937	55.12
22	LOPOK	2,475	692	27.96	2,491	277	11.12	6,835	649	9.50
23	LANTUNG	1,019	175	17.17	881	145	16.46	1,295	214	16.53
24	LENANGGUAR	1,054	371	35.20	1,052	45	4.28	2,553	559	21.90
JUMLAH		131,009	23,329	17.81	122,053	9,581	7.85	162,681	27,915	17.16

Tabel 3.19. Data Keluarga Pra Sejahtera Tahun 2020 dan 2022

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa terjadi peningkatan jumlah keluarga pra sejahtera dari tahun 2021 sebesar 9.581 atau 7,85% menjadi 27.915 atau 17,16%. Angka keluarga pra sejahtera yang disajikan masih tinggi namun pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas p2kbp3a telah dilaksanakan secara optimal sedangkan capaian realiasi tidak memenuhi target dapat dipengaruhi oleh pelaksanaan program kegiatan yang menunjang penurunan angka keluarga pra sejahtera yang berada pada urusan pembangunan lainnya.

2. Peningkatan pemenuhan indikator kualitas keluarga

Pembangunan Ketahanan Keluarga merupakan upaya berkelanjutan oleh pemerintah kabupaten, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin. Untuk tahun 2022 Peningkatan pemenuhan indikator kualitas keluarga difokuskan kepada pembentukan PUSPAGA.

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera yang dilakukan oleh tenaga profesi melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggungjawab mengasuh dan melindungi anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.

Dari dua indikator pendukung tersebut disadari bahwa hanya memiliki peran yang sangat kecil dalam Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera, hal itu disadari karena peningkatan kesejahteraan masyarakat juga menjadi peran dari perangkat daerah lain seperti Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan perangkat daerah yang program kegiatannya memiliki impact yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat

Adapun data pemenuhan indikator kualitas keluarga di kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut :

No.	Dimensi / Indikator	Persentase capaian
a.	Dimensi Kualitas Legalitas Struktural :	
	1. Kepemilikan akte kelahiran penduduk kabupaten sumbawa terhadap jumlah penduduk adalah	80,85% (419.845) jiwa
	- Keluarga tinggal bersama memiliki rumah sendiri	88,31%
b.	Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (KKF)	
	- Makanan sehat bergizi untuk keluarga	75%
	- Keluhan kesehatan keluarga	25%
	- Pervalensi kurang gizi anggota keluarga	25%
	- Ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak	80%
	- Anak merokok rata2	2,85%
	- Anggota keluarga sakit hingga terganggu	25%
c.	Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE)	
	- Keluarga tinggal bersama memiliki rumah sendiri	88,31%
	- Keluarga tidak miskin	88,31%
	- Memiliki rekening tabungan	70%
	- Memiliki asuransi kesehatan	80%
	- Rata-rata Anak putus sekolah umur 7-12 dan 13-16 sebesar	10%
	- Perempuan bekerja	24,87%
d.	Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP)	
	- Kekerasan terhadap suami-istri	25 kasus
	- kekerasan orang tua dan anak	55 kasus
	- Anggota keluarga terlibat masalah pelanggaran hukum	Anak 53 orang tua 819
e.	Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Budaya (KKB)	
	- keluarga ikut dalam kegiatan sosial	80%
	- Keluarga memberi perhatian pada lansia	70%
	- Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara rutin	80%

Tabel 3.20. Capaian indikator kualitas keluarga

h. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi anggaran untuk indikator Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2022	Pagu Indikatif Renstra Tahun 2022 (Rp juta)	Pagu DPA TA. 2022 (Rp juta)	Pagu DPPA TA. 2022 (Rp juta)	Realisasi Anggaran (Rp juta)	Capaian Realisasi Anggaran
Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera	82,84	1,594	2.939	2.558	1.601	62,61

Tabel 3.21. Efisiensi anggaran indikator peningkatan keluarga Pra Sejahtera Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, maka upaya pencapaian target Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera telah dilakukan dengan sangat baik yang ditunjukkan oleh capaian kinerja sebesar 82,84%. Jumlah capaian realisasi

anggaran berdasarkan anggaran DPPA TA. 2022 sebesar 62,61%, namun jika jumlah realisasi anggaran pada Tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan pagu indikatif dalam Renstra Tahun 2022, maka capaian anggaran yang direalisasikan TA. 2022 hanya sebesar 100,47%. Maka diketahui bahwa Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera berkinerja sebesar 82,84% dengan menggunakan anggaran sebesar 62,61%, dari jumlah anggaran dalam DPPA Tahun 2022 dan sebesar 100,47% dari pagu indikatif Tahun 2022 dalam Renstra. Hal ini merupakan salah satu bentuk efisiensi atas anggaran, karena jumlah target Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera yang ditetapkan dalam Renstra tidak dilakukan penyesuaian akibat perubahan anggaran pada Tahun 2022 sebagai salah satu input utama.

i. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No.	Program / Kegiatan	Idikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Penurunan angka keluarga pra sejahtera	16.91	17.16	98.54
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	21.00	29.13	138.71
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang tersedia	27.00	27.00	100.00
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kader POKTAN yang dibina	1,152.00	1,152.00	100.00
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok yang difasilitasi penyediaan biaya operasionalnya	392.00	392.00	100.00
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapatkan fasilitasi promosi dan sosialisasi serta pembinaan	8.00	8.00	100.00
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapatkan fasilitasi promosi dan sosialisasi menjadi orang tua hebat generasi berencana	19.00	19.00	100.00

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan pemenuhan indikator kualitas keluarga	40.00	40.00	100.00
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang dilatih	1.00	1.00	100.00
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga PUSPAGA yang terbentuk	1.00	1.00	100.00
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Indikator pembangunan ketahanan keluarga yang terpenuhi	2.00	2.00	100.00
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah mitra yang melakukan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak	1.00	1.00	100.00
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KIE KG dan Perlindungan anak yang tersedia	1.00	1.00	100.00
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Masyarakat	3.00	3.00	100.00

Tabel 3.22. Program/kegiatan yang menunjang indikator peningkatan keluarga Pra Sejahtera Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas target indikator kinerja program yang menunjang indikator Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera dapat tercapai. Hal ini menjelaskan bahwa capaian tersebut dipengaruhi oleh optimalnya pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan dalam program terkait sehingga ketercapaian dari keluaran di level kegiatan dan sub kegiatan dalam masing – masing program mempengaruhi capaian kinerja program.

3. Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

a. Definisi Operasional dan Tata Cara Pengukuran Kinerja

Sasaran Strategis Meningkatnya kinerja perangkat daerah ini masuk dalam Misi Ketiga RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 yaitu Sumbawa Bersih dan melayani, adapun indikator dari sasaran tersebut adalah Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, **Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A dihitung berdasarkan hasil penilaian atau review yang dilakukan oleh APIP atau inspektorat kabupaten Sumbawa.**

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat, serta Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP. Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)nya, serta mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan evaluasi implementasi SAKIP. Dengan evaluasi tersebut diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah daerah untuk secara konsisten meningkatkan dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang telah diamanatkan dalam RPJMD.

b. Capaian Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan definisi diatas dilaporkan bahwa capaian kinerja indikator Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A pada Tahun 2022 adalah kategori A

c. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria Capaian Kinerja 2022
Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A	BB	A	103,89	Sangat Tinggi

Tabel 3.23. Target dan Realisasi Nilai SAKIP DP2KBP3A Kab. Sumbawa

Berdasarkan penetapan PK Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2022, diketahui bahwa indikator Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A memiliki target kategori BB, maka dengan realisasi kategori A

menjadikan capaian indikator Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A pada Tahun 2022 menjadi 103,89%, nilai 103,89 tersebut dihitung berdasarkan nilai hasil evaluasi oleh APIP yaitu berada pada angka 81,79 yang berada pada kategori A yang jika dibandingkan dengan nilai target yang telah ditetapkan di dalam renstra sebesar 78,73 yang masih dalam kategori BB. Dengan capaian tersebut, maka nilai realisasi kinerja indikator Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A pada Tahun 2022 berada dalam interval nomor 1 dengan kriteria penilaian realisasi kinerja “sangat tinggi” karena pencapaian atau realisasi kinerja capaian telah melebihi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

- d. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2022 dengan Tahun sebelumnya

Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Kriteria Capaian Kinerja
Tahun 2020		BB		
Tahun 2021	BB	BB	100%	Sangat Tinggi
Tahun 2022	BB	A	103,89%	Sangat Tinggi

Tabel 3.24. Target dan Realisasi Nilai SAKIP DP2KBP3A Kab. Sumbawa Tahun 2020 - 2022

Sesuai dengan realisasi Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A, jika dibandingkan dengan realisasi Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A pada Tahun 2021 yang diketahui adalah kategori BB dan realisasi pada Tahun 2022 adalah kategori A. Capaian nilai realisasi tersebut menjadikan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa tetap konsisten berkinerja baik terhadap Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A pada 2 (dua) tahun terakhir.

- e. Perbandingan antara realisasi kinerja s.d. tahun n dengan target Renstra

No	Indikator Kinerja	Tahun II Renstra (2022)			Tahun Akhir Renstra (2026)		
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi 2022	Tingkat Capaian
1.	Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A	BB	A	103,89%	A	A	102,07

Tabel 3.25. Target dan Realisasi Nilai SAKIP DP2KBP3A Kab. Sumbawa Tahun 2020 - 2022

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2021 tentang Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, diketahui bahwa pada periode akhir Restra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa adalah Tahun 2026, Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A memiliki target kategori A atau nilai 80,13, maka dengan realisasi kategori A atau nilai 81,79 pada tahun 2022 atau menjadikan capaian Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A pada Tahun 2022 berbading dengan target periode akhir Restra Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa menjadi 102,07%.

f. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2022 dengan standar provinsi dan Nasional (jika ada)

Tidak dilakukan perbandingan terhadap realisasi kinerja Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 dengan standar provinsi dan nasional, karena indikator kinerja tersebut tidak ditemukan di tingkat provinsi maupun nasional.

g. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan laporan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 oleh Inspektorat Kabupaten Sumbawa maka capaian yang diperoleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa dalam nilai kisaran 0 – 100 adalah sebesar 81,79 yang menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa berada pada kategori A yang berarti memuaskan yaitu akuntabel, berkinerja baik dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Dengan demikian sasaran meningkatnya hasil penilaian akuntabilitas perangkat daerah dengan indikator kinerja peningkatan kategori nilai SAKIP Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa memiliki capaian 103,89 % dari target kategori BB dapat tercapai melebihi target.

Dilihat dari nilai angka yang tercantum dalam target kinerja Program sebesar 78,73 dapat tercapai 81,79. Jika dilihat peningkatannya nilai pada

tahun 2021 adalah sebesar 78,49 dan mengalami kenaikan sebesar 3,30 poin, sehingga nilai pada tahun 2022 adalah sebesar 81,79. Adapun upaya yang telah dilakukan sehingga capaian Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A dapat tercapai adalah dengan menindak lanjuti rekomendasi hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa dari Inspektorat Kabupaten Sumbawa.

h. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi anggaran untuk indikator Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2022	Pagu Indikatif Renstra Tahun 2022 (Rp juta)	Pagu DPA TA. 2022 (Rp juta)	Pagu DPPA TA. 2022 (Rp juta)	Realisasi Anggaran (Rp juta)	Capaian Realisasi Anggaran
Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A	A	10.745	7.738	6.596	6.552	99,33

Tabel 3.26. Efisiensi anggaran indikator peningkatan Nilai SAKIP DP2KBP3A Kab. Sumbawa

Berdasarkan tabel di atas, maka upaya pencapaian target Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A telah dilakukan dengan sangat baik yang ditunjukkan oleh capaian kinerja kategori A. Jumlah capaian realisasi anggaran berdasarkan anggaran DPPA TA. 2022 sebesar 99,33%, namun jika jumlah realisasi anggaran pada Tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan pagu indikatif dalam Renstra Tahun 2022, maka capaian anggaran yang direalisasikan TA. 2022 hanya sebesar 60.97%. Maka diketahui bahwa Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A berkinerja kategori A dengan menggunakan anggaran sebesar 99,33% dari jumlah anggaran dalam DPPA Tahun 2022 dan sebesar 60.97% dari pagu indikatif Tahun 2022 dalam Renstra. Hal ini merupakan salah satu bentuk efisiensi atas anggaran, karena jumlah target Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A yang ditetapkan dalam Renstra tidak dilakukan penyesuaian akibat perubahan anggaran pada Tahun 2022 sebagai salah satu input utama.

i. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No.	Program / Kegiatan	Idikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan nilai Sakip DP2KBP3A	78.73	81.79	103.89
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun	7.00	7.00	100.00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1.00	1.00	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang disusun	1.00	1.00	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1.00	1.00	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) yang disusun	1.00	1.00	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD) yang disusun	1.00	1.00	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD yang disusun	2.00	2.00	100.00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja PD yang disusun	4.00	4.00	100.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD yang disusun	7.00	7.00	100.00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Penyediaan Gaji dan Tunjangan			
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN SKPD yang disusun	3.00	3.00	100.00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang disusun	350.00	538.00	153.71
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Laporan Akuntansi SKPD yang disusun	1.00	1.00	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	1.00	1.00	100.00
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang disusun	1.00	1.00	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD yang disusun	4.00	4.00	100.00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran PD yang disusun	1.00	1.00	100.00

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum PD yang disusun	4.00	4.00	100.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	8.00	8.00	100.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12.00	12.00	100.00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang di Fasilitasi	12.00	12.00	100.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diikuti	5.00	5.00	100.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadaan BMD Penunjang Urusan PD yang disusun	1.00	1.00	100.00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1.00	1.00	100.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang disusun	3.00	3.00	100.00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat (masuk/keluar) yang di kelola/ di tata	1,187.00	10,503.00	884.84
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar	3.00	3.00	100.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas (Penyedia Jasa Layanan Kebersihan Kantor) yang difasilitasi	1.00	1.00	100.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD yang disusun	2.00	2.00	100.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan dan pembayaran Pajak	1.00	1.00	100.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan dan pembayaran Pajak	6.00	5.00	83.33

Tabel 3.27. Program/kegiatan yang menunjang indikator peningkatan Nilai SAKIP DP2KBP3A Kab. Sumbawa

Berdasarkan tabel diatas, target indikator kinerja program dapat tercapai. Hal ini dapat dijelaskan bahwa capaian tersebut dipengaruhi oleh optimalnya pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan dalam program terkait, sehingga ketercapaian dari keluaran di level kegiatan dan sub kegiatan dalam masing-masing program mempengaruhi capaian kinerja program.

4. Sasaran Strategis Meningkatkan Anggaran Responsif Gender di Daerah

a. Definisi Operasional dan Tata Cara Pengukuran Kinerja

Sasaran Strategis Meningkatkan anggaran responsif gender di daerah ini masuk dalam Misi Keempat RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 yaitu Sumbawa Aman dan Berbudaya, adapun indikator dari sasaran tersebut adalah Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD.

Berdasarkan peraturan Bupati Sumbawa Sumbawa Nomor 73 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa tahun 2021 – 2026, Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD dihitung dengan formulasi :

Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD	$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja langsung APBD}}{\text{Jumlah seluruh belanja langsung APBD}} \times 100$
--	---

Perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan salah satu bentuk penerapan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan, khususnya dalam tahap perencanaan dan penyusunan anggaran. Dengan mengadopsi PPRG, kita mengakui bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kebutuhan, persoalan dan perspektif yang berbeda. Oleh karenanya keduanya harus dilibatkan dalam pembangunan, agar tercipta Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat yang merata demi mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

b. Capaian Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan definisi diatas dilaporkan bahwa capaian kinerja indikator Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD pada Tahun 2022 adalah sebesar 31,84%

c. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria Capaian Kinerja 2022
Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD	11,00	31,84	289,45	Sangat Tinggi

Tabel 3.28. Target dan realisasi Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD

Berdasarkan penetapan PK Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2022, diketahui bahwa indikator Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD memiliki target sebesar 11,00%, maka dengan realisasi sebesar 31,84% menjadikan capaian indikator Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD pada Tahun 2022 menjadi 289,45%. Dengan capaian tersebut, maka nilai realisasi kinerja indikator Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD Anak pada Tahun 2022 berada dalam interval nomor 1 dengan kriteria penilaian realisasi kinerja “sangat tinggi” karena pencapaian atau realisasi kinerja capaian telah melebihi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

- d. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2022 dengan Tahun-tahun sebelumnya

Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Kriteria Capaian Kinerja
Tahun 2020		7,72		
Tahun 2021	8,19	17,76	216,84	Sangat Tinggi
Tahun 2022	11,00	31,84	289,45	Sangat Tinggi

Tabel 3.29. Target dan realisasi Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD tahun 2020 - 2022

Sesuai dengan realisasi Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD pada Tahun 2022, jika dibandingkan dengan realisasi Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD pada Tahun 2021 yang diketahui sebesar 17,76% dan realisasi pada Tahun 2022 sebesar 31,84%. Capaian nilai realisasi tersebut menjadikan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa berkinerja baik terhadap indikator Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD pada 2 (dua) tahun terakhir.

- e. Perbandingan antara realisasi kinerja s.d. tahun n dengan target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Tahun II Renstra (2022)			Tahun Akhir Renstra (2026)		
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi 2022	Tingkat Capaian
1.	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD	11,00	31,84	289,45	14,00	31,84	227,42

Tabel 3.30. Target akhir Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD dan realisasi 2022

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2021 tentang Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, diketahui bahwa pada periode akhir Restra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa (Tahun 2026), Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD memiliki target sebesar 14,00%, maka dengan realisasi sebesar 31,84% menjadikan capaian Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD pada Tahun 2022 berbading dengan target periode akhir Restra Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa menjadi 227,42%.

f. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2021 dengan standar provinsi dan Nasional (jika ada)

Tidak dilakukan perbandingan terhadap realisasi kinerja Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 dengan standar provinsi dan nasional, karena indikator kinerja tersebut tidak ditemukan di tingkat provinsi maupun nasional.

g. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Pelaksanaan ARG sebenarnya sudah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di daerah, namun penegasan untuk melaksanakan ARG melalui analisis gender baru tercantum dalam Permendagri No. 67 Tahun 2011. Sejak dikeluarkannya Permendagri No. 67 Tahun 2011 tersebut, dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa telah melakukan inisiasi tersusunnya ARG bagi program dan kegiatan pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi Pilot Project penerapan ARG yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas P2KBP3A. Sampai saat ini baru 30 Perangkat Daerah yang telah melakukan penyusunan GAP atau Gender Analysis Pathway dari 39 Perangkat Daerah yang telah dilakukan pelatihan dan pendampingan.

Tercapainya target Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD tidak lepas dari peran Driver PUG yaitu Bappeda, Inspektorat dan BPKAD, khususnya bappeda yang selalu mengawal dalam penyusunan GAB

pada perangkat daerah. Selain itu sosialisasi dan pendampingan ulang terhadap Perangkat Daerah yang pernah dilatih.

Diakui sampai saat ini semua dokumen GAP yang telah disusun dan dikumpulkan belum dapat dilakukan analisis secara mendalam, namun dengan adanya dokumen GAP yang telah disusun oleh Perangkat Daerah membuktikan bahwa Kabupaten Sumbawa telah memberikan perhatian terhadap kesetaraan gender

h. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi anggaran untuk indikator Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2021	Pagu Indikatif Renstra Tahun 2021 (Rp juta)	Pagu DPA TA. 2021 (Rp juta)	Pagu DPPA TA. 2021 (Rp juta)	Realisasi Anggaran (Rp juta)	Capaian Realisasi Anggaran
Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	31,84	797	266	258	175	68,18

Tabel 3.31. Efisiensi anggaran indikator Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD

Berdasarkan tabel di atas, maka upaya pencapaian target Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD telah dilakukan dengan sangat baik yang ditunjukkan oleh capaian kinerja sebesar 31,84%. Jumlah capaian realisasi anggaran berdasarkan anggaran DPPA TA. 2022 sebesar 68,18%, namun jika jumlah realisasi anggaran pada Tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan pagu indikatif dalam Renstra Tahun 2022, maka capaian anggaran yang direalisasikan TA. 2022 hanya sebesar 22,06%. Maka diketahui bahwa Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD berkinerja sebesar 31,84% dengan menggunakan anggaran sebesar 68,18% dari jumlah anggaran dalam DPPA Tahun 2022 dan sebesar 22,06% dari pagu indikatif Tahun 2022 dalam Renstra. Hal ini merupakan salah satu bentuk efisiensi atas anggaran, karena jumlah target Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD yang ditetapkan dalam Renstra tidak

dilakukan penyesuaian akibat perubahan anggaran pada Tahun 2022 sebagai salah satu input utama.

- i. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan program kegiatan yang menunjang pencapaian target indikator Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD. Realisasi target kinerja dari program kegiatan tersebut mempengaruhi tingkat capaian indikator Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD, adapun program kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Program / Kegiatan	Idikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Peningkatan persentase PD yang menerapkan anggaran Responsif Gender Melalui APBD	52.73	52.73	100.00
		Peningkatan persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan pada sektor politik,ekonomi sosial dan budaya	0.01	0.01	100.00
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah dilatih PUG	40.00	40.00	100.00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Kebijakan Pelaksanaan PUG	1.00	1.00	100.00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah program PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	20.00	30.00	150.00
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan analisa PPRG dalam penyusunan anggaran	20.00	20.00	100.00
	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah OPD yang terfasilitasi PUG termasuk PPRG	20.00	-	0.00
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	2.00	2.00	100.00
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Perempuan yang mendapatkan pelatihan di Bidang Politik, Hukum, Sosial danEkonomi	40.00	40.00	100.00
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	1.00	1.00	100.00
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sarana KIE yang tersedia	1.00	1.00	100.00

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penurunan rasio kekerasan pada perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) yang ditangani	8.47	6.55	129.31
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap perempuan	2.00	2.00	100.00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen kerjasama Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.00	2.00	100.00
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100.00	100.00	100.00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditangani	12.00	17.00	141.67
3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase capaian kinerja pengelolaan sistem data gender dan anak	100.00	100.00	100.00
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data yang terinput dalam sistem SIGA dan SIMPONI	100.00	100.00	100.00
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah data gender dan anak	12.00	12.00	100.00
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah media publikasi data gender dan anak	2.00	2.00	100.00
1	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0.04	0.04	100.00
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	2.00	2.00	100.00
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen kerjasama Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2.00	2.00	100.00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak kerja sama lintas sektor	5.00	5.00	100.00

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	2.00	2.00	100.00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	2.00	2.00	100.00
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100.00	100.00	100.00
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditangani	17.00	52.00	305.88
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/ fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	1.00	1.00	100.00

Tabel 3.32. Program kegiatan yang menunjang indikator Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD

Bersarkan tabel diatas target program yang menunjang indikator Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD dapat tercapai dan bahkan ada yang melebihi target.

5. Sasaran Strategis Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak

a. Definisi Operasional dan Tata Cara Pengukuran Kinerja

Sasaran Strategis Meningkatnya capaian indikator kabupaten layak anak ini masuk dalam Misi Keempat RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 yaitu Sumbawa Aman dan Berbudaya, adapun indikator dari sasaran tersebut adalah Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak dihitung dengan formulasi:

$$\text{Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak} = \frac{\text{Hasil Pengukuran KLA (T - n)} - \text{Hasil Pengukuran KLA (T - n)}}{\text{Hasil Pengukuran KLA (T - n)}} \times 100$$

b. Capaian Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan definisi diatas dilaporkan bahwa capaian kinerja indikator Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak pada Tahun 2022 adalah 17.64%

c. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria Capaian Kinerja 2022
Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	8,27	17,64	213,30	Sangat Tinggi

Tabel 3.33. Target dan Realisasi Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak

Berdasarkan penetapan PK Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2022, diketahui bahwa indikator Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak memiliki target sebesar 8,27%, maka dengan realisasi sebesar 17,64% menjadikan capaian indikator Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak pada Tahun 2022 menjadi 213,30%. Dengan capaian tersebut, maka nilai realisasi kinerja indikator Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak pada Tahun 2022 berada dalam interval nomor 1 dengan kriteria penilaian realisasi kinerja “sangat tinggi” karena pencapaian atau realisasi kinerja capaian telah melebihi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

d. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2022 dengan Tahun sebelumnya

Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Kriteria Capaian Kinerja
Tahun 2020	32	32,09	100,29	Sangat Tinggi
Tahun 2021	0,10	84,55	84.549,36	Sangat Tinggi
Tahun 2022	8,27	17,64	213,30	Sangat Tinggi

Tabel 3.34. Target dan Realisasi Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak tahun 2020 - 2022

Sesuai dengan realisasi Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak pada Tahun 2022, jika dibandingkan dengan realisasi Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak pada Tahun 2021 yang diketahui sebesar 84,55% dan realisasi pada Tahun 2022 sebesar 213,30%. Capaian nilai realisasi tersebut menjadikan Dinas P2KBP3A Kabupaten

Sumbawa tetap konsisten berkinerja baik terhadap Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak pada 2 (dua) tahun terakhir.

e. Pembandingan antara realisasi kinerja s.d. tahun n dengan target Renstra

Indikator Kinerja	Tahun II Renstra (2022)			Tahun Akhir Renstra (2026)		
	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi 2022	Tingkat Capaian
Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	8,27	17,64	213,30	6,65	17,64	265,26

Tabel 3.35. Target akhir Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak dalam renstra dan realisasi 2022

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2021 tentang Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, diketahui bahwa pada periode akhir Restra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa (Tahun 2026), Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak memiliki target sebesar 6,65%, maka dengan realisasi sebesar 17,64% menjadikan capaian Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak pada Tahun 2022 berbading dengan target periode akhir Restra Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa menjadi 265,26%.

f. Pembandingan antara realisasi kinerja Tahun 2022 dengan standar provinsi dan Nasional (jika ada)

Tidak dilakukan pembandingan terhadap realisasi kinerja Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 dengan standar provinsi dan nasional, karena indikator kinerja tersebut tidak ditemukan di tingkat provinsi maupun nasional.

g. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Pada uraian sebelumnya capaian Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak memang meningkat dan memenuhi target yang telah ditetapkan, namun secara status Kabupaten Sumbawa baru mencapai status pratama dan belum dapat masuk kedalam kategori KLA. Hal itu di karenakan masih banyak kendala yang dihadapi untuk mencapai status atau

predikat KLA dari kementerian PPPA. Berikut disajikan data capaian nilai hasil pengukuran indikator KLA oleh KemenPPPA RI tahun 2022 sebagai berikut :

NO	KLASTER/INDIKATOR	JUMLAH PERTANYAAN	NILAI MAKS.	CAPAIAN	%	BELUM TERCAPAI
	PENGUATAN KELEMBAGAAN					
1	Tersedianya Peraturan /Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak	3.00	85.00	55.00	64.71	30.00
2	Menguatnya Kelembagaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	8.00	33.00	15.00	45.45	18.00
3	Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa dalam pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	8.00	32.00	13.50	42.19	18.50
	Jumlah Penguatan Kelembagaan	19.00	150.00	83.50	55.67	66.50
	KLASTER I : HAK SIPIL KEBEBASAN					
4	Persentase Anak yang Diregistrasikan dan Mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran	7.00	25.00	12.00	48.00	13.00
5	Tersedia Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)	9.00	40.00	27.00	67.50	13.00
6	Terlembaganya partisipasi anak	7.00	50.00	14.00	28.00	36.00
	Jumlah Klaster I	23.00	115.00	53.00	46.09	62.00
	KLASTER II: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF					
7	Persentase Perkawinan Anak	4.00	50.00	25.00	50.00	25.00
8	Tersedianya Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga	8.00	53.00	24.00	45.28	29.00
9	Persentase lembaga Pengasuhan alternatif terstandarisasi	5.00	22.00	10.00	45.45	12.00
10	Persentase Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)	4.00	10.00	4.00	40.00	6.00
11	Tersedia infrastruktur (sarana dan prasarana) di ruang publik yang ramah anak	11.00	35.00	15.00	42.86	20.00
	Jumlah Klaster II	32.00	170.00	78.00	45.88	92.00
	KLASTER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN					
12	Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.00	16.00	8.50	53.13	7.50
13	Prevalensi Status Gizi Balita	7.00	22.00	15.00	68.18	7.00
14	Persentase cakupan Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia dibawah 2 tahun	10.00	34.50	23.50	68.12	11.00
15	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak	6.00	17.50	9.00	51.43	8.50
16	Persentase Rumah Tangga dengan akses air minum dan sanitasi	8.00	25.00	14.50	58.00	10.50
17	Tersedianya Kawasan Tanpa Rokok	13.00	35.00	24.00	68.57	11.00
	Jumlah Klaster III	51.00	150.00	94.50	63.00	55.50
	KLASTER IV: PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA					
18	Persentase Wajin Belajar 12 Tahun	4.00	20.00	12.00	60.00	8.00
19	Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA)	17.00	57.50	18.50	32.17	39.00
20	Tersedia fasilitas untuk kegiatan Budaya, Kreativitas dan Rekreasi yang Ramah Anak	9.00	32.50	14.00	43.08	18.50
	Jumlah Klaster IV	30.00	110.00	44.50	40.45	65.50
	KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS					
21A	Pencegahan dalam perlindungan khusus	10.00	83.00	39.85	48.01	43.15
21B	Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi	2.00	17.00	7.00	41.18	10.00
21C	Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)	5.00	22.00	13.50	61.36	8.50
22A	Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS	2.00	17.00	9.00	52.94	8.00
22B	Pelayanan Bagi Anak Korban Bencana dan Konflik	4.00	18.00	11.50	63.89	6.50
23A	Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi	5.00	23.00	13.00	56.52	10.00
23B	Pelayanan Bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)	2.00	7.00	5.00	71.43	2.00
24A	Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (Khusus Pelaku)	6.00	11.00	2.00	18.18	9.00
24B	Pelayanan Bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya	3.00	7.00	4.00	57.14	3.00
	JUMLAH KLASTER V	39.00	205.00	104.85	51.15	100.15
	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK					
25	Kecamatan Layak Anak	16.00	25.00	17.00	68.00	8.00
26	Desa/Kelurahan Layak Anak	21.00	75.00	30.50	40.67	44.50
	JUMLAH KELURAHAN LAYAK ANAK	30.00	100.00	47.50	47.50	52.50
	TOTAL JUMLAH	224.00	1,000.00	505.85	50.59	494.15

Tabel 3.36. Nilai hasil pengukuran indikator KLA oleh KemenPPPA RI tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa baru 50,59% atau 505.85 poin nilai yang dapat dipenuhi dari 1000 poin untuk mendapatkan kategori KLA, Adapun kendala atau permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Kelembagaan KLA di level kabupaten belum sepenuhnya dapat berjalan karena banyak hal, seperti di dalam internal kelembagaan itu sendiri belum berjalan koordinasi yang baik antar OPD yang merupakan bagian dari Gugus Tugas KLA.
- b. Masih banyak aturan yang belum terbentuk untuk mendukung terwujudnya KLA
- c. Implementasi pemenuhan hak anak berdasarkan klaster belum maksimal. Hal ini ditunjukkan pencapaian tiap-tiap klaster belum terpenuhi secara keseluruhan dan masih dibawah target rencana pencapaian yang telah ditetapkan.
- d. Belum optimalnya SDM terlatih Konvensi Hak Anak (KHA) Peran Lembaga Masyarakat, OPD lain, Dunia Usaha dan Media Massa
- e. Keikutsertaan perwakilan anak dalam forum musrenbang hanya seremonial, sementara suara anak dalam forum musrenbang belum dapat di realisasikan secara nyata

Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi diatas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran Bappeda sebagai ketua Gugus Tugas KLA untuk mengoptimalkan koordinasi antar OPD yang tergabung di dalam Gugus Tugas KLA
2. Menyusun dan mengusulkan rancangan pembentukan regulasi yang menunjang terwujudnya KLA
3. Melakukan pemetaan terhadap hak anak yang belum terpenuhi berdasarkan klaster dan melakukan advokasi kepada instansi dan stakeholder terkait untuk penuhannya dan disertai data dukung yang valid.
4. Melakukan refresing terhadap tenaga yang pernah dilatih konvensi hak anak dan melakukan pelatihan untuk yang belum pernah mendapatkan pelatihan konvensi hak anak
5. Melakukan advokasi untuk terkait pemenuhan aspirasi atau suara anak yang di sampaikan dalam forum musrenbang.

h. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi anggaran untuk indikator Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2022	Pagu Indikatif Renstra Tahun 2022 (Rp juta)	Pagu DPA TA. 2022 (Rp juta)	Pagu DPPA TA. 2022 (Rp juta)	Realisasi Anggaran (Rp juta)	Capaian Realisasi Anggaran
Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	17,64	346	339	351	301	85,90

Tabel 3.37. Efisiensi anggaran indikator Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak

Berdasarkan tabel di atas, maka upaya pencapaian target Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak telah dilakukan dengan sangat baik yang ditunjukkan oleh capaian kinerja sebesar 17,64%. Jumlah capaian realisasi anggaran berdasarkan anggaran DPPA TA. 2022 sebesar 85,90%, namun jika jumlah realisasi anggaran pada Tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan pagu indikatif dalam Renstra Tahun 2022, maka capaian anggaran yang direalisasikan TA. 2022 hanya sebesar 87,10%. Maka diketahui bahwa Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak berkinerja sebesar 17,64% dengan menggunakan anggaran sebesar 85,90% dari jumlah anggaran dalam DPPA Tahun 2022 dan sebesar 87,10% dari pagu indikatif Tahun 2022 dalam Renstra. Hal ini merupakan salah satu bentuk efisiensi atas anggaran, karena jumlah target Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak yang ditetapkan dalam Renstra tidak dilakukan penyesuaian akibat perubahan anggaran pada Tahun 2022 sebagai salah satu input utama.

i. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada Tahun 2022 telah dilaksanakan sejumlah program yang diikuti oleh kegiatan dan sub kegiatan untuk mendukung terpenuhinya capaian Indikator Kabupaten Layak Anak. Realisasi target kinerja keluaran di level kegiatan dan sub kegiatan berkontribusi dan mempengaruhi tingkat capaian indikator

tersebut. Kegiatan dan Sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 tersebut diketahui ada terealisasi sesuai dengan target, ada yang tidak mencapai target dan ada juga yang melebihi target, sebagai berikut:

No.	Program / Kegiatan	Idikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0.04	0.04	100.00
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	2.00	2.00	100.00
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen kerjasama Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2.00	2.00	100.00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak kerja sama lintas sektor	5.00	5.00	100.00
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	2.00	2.00	100.00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	2.00	2.00	100.00
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100.00	100.00	100.00
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditangani	17.00	52.00	305.88
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/ fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	1.00	1.00	100.00

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Peningkatan persentase Pemenuhan Indikator KLA	91.67	50.59	55.19
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Partisipasi Anak yang terbentuk	4.00	17.00	425.00
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah Forum Anak yang ikut dalam proses perencanaan pembangunan daerah	4.00	17.00	425.00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah forum anak kecamatan yang terbentuk	4.00	17.00	425.00
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang difasilitasi	7.00	17.00	242.86
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah ramah anak yang dibentuk / ditetapkan	6.00	6.00	100.00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KIE Pemenuhan Hak Anak yang tersedia	3.00	3.00	100.00
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi	1.00	1.00	100.00
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang tua yang mendapatkan layanan Konsultasi Pengasuhan Anak	15.00	52.00	346.67

Tabel 3.38. Program kegiatan penunjang Indikator Kabupaten Layak Anak

Berdasarkan tabel diatas, terdapat target indikator kinerja program yang tercapai dan bahkan melebihi target. Hal ini dapat dijelaskan bahwa capaian tersebut dipengaruhi oleh optimalnya pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan dalam program terkait, sehingga ketercapaian dari keluaran di level kegiatan dan sub kegiatan dalam masing-masing program mempengaruhi capaian kinerja

outcome. Namun terdapat juga target indikator program yang tidak tercapai yaitu Peningkatan persentase Pemenuhan Indikator KLA. penyebab tidak tercapainya target kinerja Peningkatan persentase Pemenuhan Indikator KLA adalah sebagai berikut :

1. masih minimnya dukungan dari PD lain untuk menyediakan dokumen laporan pemenuhan indikator KLA yang terkait dan/atau diselenggarakan secara lengkap sesuai standar/ketentuan penilaian KLA
2. sampai akhir tahun 2022 belum ada sekolah yang ditetapkan dengan SK Bupati/ Kepala PD terkait walaupun secara faktual unit sekolah di daerah telah memenuhi kriteria sebagai sekolah ramah anak.
3. Forum anak belum sepenuhnya dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh OPD
4. Belum seluruhnya regulasi yang mendukung terwujudnya KLA dibentuk

Upaya yang dilakukan adalah melakukan percepatan dalam pemenuhan data dukung dari seluruh indikator yang telah terpenuhi, dan mengadvokasi dunia usaha untuk terlibat dalam setiap pelaksanaan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.

3.2. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 14 Tahun 2022 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 dapat disajikan jumlah pagu dan jumlah realisasi anggaran pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2022, sebagai berikut:

No	Uraian	Berdasarkan Perubahan APBD Tahun 2021		
		Target/Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan			
2	Belanja Daerah :	14.532.668.150	13.137.753.447	90,40
2.1	Belanja Operasi :	13.695.681.650	12.429.432.947	90,75
	Belanja Pegawai	6.266.722.266	6.241.550.925	99,59
	Belanja Barang Jasa	7.428.959.384	6.187.882.022	83,29
2.2	Belanja Modal	836.986.500	708.320.500	84,63
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	836.986.500	708.320.500	84,63
	Jumlah	14.532.668.150	13.137.753.447	90,40

Tabel 3.39. Ringkasan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Berdasarkan DPPA)

Selanjutnya disajikan rincian alokasi dan realisasi anggaran Tahun 2022 dalam masing-masing Indikator Sasaran (IKU) berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan, sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Berdasarkan Perubahan APBD Tahun 2022		
				Target / Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Penurunan kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	3,338,178,000	3,199,101,600	95.83
			Persentase capaian kinerja pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	1,257,495,000	1,135,110,120	90.27
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	1,957,873,000	1,818,796,600	92.90
		Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah pelaksanaan rakor bersama mitra	3,777,400	3,700,000	97.95
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah KIE yang sesuai dengan kearifan budaya lokal	27,657,600	27,657,600	100.00
		Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah media massa cetak yang terlibat dalam KIE Program KKBPK	68,580,000	20,580,000	30.01
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Anggota POKJA kampung KB yang terlibat dalam mekanisme operasional program KKBPK	772,608,000	769,056,000	99.54
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai Penyuluhan yang mendapatkan dana operasional	982,320,000	920,903,000	93.75
		Pengendalian Program KKBPK	Jumlah pelaksanaan audit kasus stunting	102,930,000	76,900,000	74.71
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	588,305,000.00	588,305,000	100.00
		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah OPD yang melakukan intervensi pembangunan kampung KB	1,805,000	1,805,000	100.00
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	586,500,000	586,500,000	100.00
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penurunan Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	792,000,000	792,000,000	100.00
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader PPKBD dan Sub PPKBD yang melaksanakan penyuluhan penggerakan pelayanan dan pengembangan program KKBPK	792,000,000	792,000,000	100.00

No.	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Berdasarkan Perubahan APBD Tahun 2022		
				Target / Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	1,257,495,000	1,135,110,120	90.27
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Faskes teregister yang mendapat ketersediaan atau distribusi alat dan obat kontrasepsi	16,650,000	16,141,120	96.94
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	803,405,000	797,375,000	99.25
		Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah kasus kegagalan penggunaan MKJP yang ditangani	17,065,000	16,665,000	97.66
		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Sarana penunjang pelayanan KB	385,000,000	269,954,000	70.12
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	14,720,000	14,720,000	100.00
		Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)	7,415,000	7,415,000	100.00
		Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor KB Pria yang dilayani	13,240,000	12,840,000	96.98
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk	172,612,000.00	171,715,780	99.48
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah dokumen kebijakan pengendalian kualitas penduduk	17,905,000	17,905,000	100.00
		Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	16,270,000	16,270,000	100.00
		Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Laporan pelaksanaan sarasehan hasil pemutakhiran data	1,635,000	1,635,000	100.00
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	154,707,000.00	153,810,780	99.42
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah laporan pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	765,000	635,000	83.01
		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah dokumen data dan informasi keluarga	24,102,000	24,102,000	100.00
		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah dokumen pencatatan dan pengumpulan data keluarga	12,720,000	12,240,000	96.23

No.	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Berdasarkan Perubahan APBD Tahun 2022		
				Target / Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	115,200,000	115,193,780	99.99
		Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	1,920,000	1,640,000	85.42
2	Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Penurunan angka keluarga pra sejahtera	2,462,190,000	1,505,842,000	61.16
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	2,462,190,000	1,505,842,000	61.16
		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang tersedia	462,000,000	448,380,000	97.05
		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kader POKTAN yang dibina	19,420,000	19,222,000	98.98
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok yang difasilitasi penyediaan biaya operasionalnya	1,965,960,000	1,023,830,000	52.08
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapatkan fasilitasi promosi dan sosialisasi serta pembinaan	1,720,000	1,720,000	100.00
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapatkan fasilitasi promosi dan sosialisasi menjadi orang tua hebat generasi berencana	13,090,000	12,690,000	96.94
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan pemenuhan indikator kualitas keluarga	95,986,624	95,776,624	99.78
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang dilatih	4,370,000	4,370,000	100.00
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga PUSPAGA yang terbentuk	4,370,000	4,370,000	100.00

No.	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Berdasarkan Perubahan APBD Tahun 2022		
				Target / Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Indikator pembangunan ketahanan keluarga yang terpenuhi	91,616,624	91,406,624	99.77
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah mitra yang melakukan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak	4,317,000	4,317,000	100.00
		Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KIE KG dan Perlindungan anak yang tersedia	2,692,499	2,692,499	100.00
		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Masyarakat	84,607,125	84,397,125	99.75
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan nilai Sakip DP2KBP3A	6,596,624,376	6,552,312,914	99.33
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun	79,625,800	78,773,400	98.93
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	11,407,300	10,747,300	94.21
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang disusun	1,752,300	1,752,300	100.00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	877,200	877,000	99.98
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) yang disusun	1,768,000	1,768,000	100.00
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD) yang disusun	853,000	852,800	99.98
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD yang disusun	1,910,000	1,910,000	100.00
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja PD yang disusun	61,058,000	60,866,000	99.69
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD yang disusun	6,289,073,696	6,263,427,355	99.59
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	6,188,122,266	6,162,950,925	99.59
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN SKPD yang disusun	90,000,000	90,000,000	100.00
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang disusun	1,855,000	1,855,000	100.00

No.	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Berdasarkan Perubahan APBD Tahun 2022		
				Target / Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Laporan Akuntansi SKPD yang disusun	3,210,548	2,735,548	85.21
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	1,261,000	1,261,000	100.00
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang disusun	1,292,000	1,292,000	100.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD yang disusun	1,582,882	1,582,882	100.00
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran PD yang disusun	1,750,000	1,750,000	100.00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum PD yang disusun	22,605,255	19,878,155	87.94
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	1,419,255	1,419,255	100.00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2,520,000	810,000	32.14
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang di Fasilitasi	1,900,000	1,900,000	100.00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diikuti	16,766,000	15,748,900	93.93
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadaan BMD Penunjang Urusan PD yang disusun	16,153,100	15,753,100	97.52
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	16,153,100	15,753,100	97.52
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang disusun	91,484,525	87,141,813	95.25
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat (masuk/keluar) yang di kelola/ di tata	15,235,000	14,835,000	97.37
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar	57,000,000	53,157,288	93.26

No.	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Berdasarkan Perubahan APBD Tahun 2022		
				Target / Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas (Penyedia Jasa Layanan Kebersihan Kantor) yang difasilitasi	19,249,525	19,149,525	99.48
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD yang disusun	97,682,000	87,339,091	89.41
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan dan pembayaran Pajak	13,052,000	12,839,000	98.37
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan dan pembayaran Pajak	84,630,000	74,500,091	88.03
4	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN	Peningkatan persentase PD yang menerapkan anggaran Responsif Gender Melalui APBD	45,270,000	39,781,400	87.88
			Peningkatan persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan pada sektor politik, ekonomi sosial dan budaya	11,571,150	10,546,150	91.14
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah dilatih PUG	45,270,000	39,781,400	87.88
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Kebijakan Pelaksanaan PUG	7,025,000	7,025,000	100.00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah program PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	3,945,000	2,631,400	66.70
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan analisa PPRG dalam penyusunan anggaran	31,225,000	29,775,000	95.36
		Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah OPD yang terfasilitasi PUG termasuk PPRG	3,075,000	350,000	11.38
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	8,316,150	7,356,150	88.46
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Perempuan yang mendapatkan pelatihan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	8,316,150	7,356,150	88.46

No.	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Berdasarkan Perubahan APBD Tahun 2022		
				Target / Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	3,255,000	3,190,000	98.00
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sarana KIE yang tersedia	3,255,000	3,190,000	98.00
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penurunan rasio kekerasan pada perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) yang ditangani	186,446,500.00	110,930,258	59.50
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap perempuan	56,201,000	56,191,000	99.98
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen kerjasama Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	56,201,000	56,191,000	99.98
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	130,245,500	54,739,258	42.03
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditangani	130,245,500	54,739,258	42.03
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase capaian kinerja pengelolaan sistem data gender dan anak	14,770,000.00	14,675,000	99.36
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data yang terinput dalam sistem SIGA dan SIMPONI	14,770,000	14,675,000	99.36
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah data gender dan anak	13,325,000	13,230,000	99.29
		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah media publikasi data gender dan anak	1,445,000	1,445,000	100.00

No.	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Berdasarkan Perubahan APBD Tahun 2022		
				Target / Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7
5	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	281,513,500	233,221,601	82.85
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	71,819,000	71,410,000	99.43
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen kerjasama Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15,070,000	14,670,000	97.35
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak kerja sama lintas sektor	56,749,000	56,740,000	99.98
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	76,806,000	62,287,173	81.10
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	76,806,000	62,287,173	81.10
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	132,888,500	99,524,428	74.89
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditangani	1,090,000	1,090,000	100.00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/ fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	131,798,500	98,434,428	74.69
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Peningkatan persentase Pemenuhan Indikator KLA	70,011,000	68,740,000	98.18
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Partisipasi Anak yang terbentuk	20,803,000	20,592,000	98.99
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah Forum Anak yang ikut dalam proses perencanaan pembangunan daerah	18,618,000	18,472,000	99.22

No.	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Berdasarkan Perubahan APBD Tahun 2022		
				Target / Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah forum anak kecamatan yang terbentuk	2,185,000	2,120,000	97.03
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang difasilitasi	49,208,000	48,148,000	97.85
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah ramah anak yang dibentuk / ditetapkan	13,225,000	13,225,000	100.00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KIE Pemenuhan Hak Anak yang tersedia	2,870,000	2,350,000	81.88
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi	27,350,000	27,090,000	99.05
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang tua yang mendapatkan layanan Konsultasi Pengasuhan Anak	5,763,000	5,483,000	95.14

Tabel 3.40. Tabel Rincian Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (berdasarkan PK)

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa tahun 2022 bertujuan untuk memberikan gambaran tentang capaian kinerja, baik makro maupun mikro dalam pelaksanaan pembangunan melalui sasaran yang tertuang di dalam Rencana Kerja. Laporan ini juga sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap tingkat capaian kinerja sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan terhadap Pengukuran Kinerja Sasaran pada Tahun Anggaran 2022. Hasil pengukuran kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa pada tahun 2022 masuk dalam kategori berhasil.

LKjIP ini merupakan kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi Pemerintah Daerah secara keseluruhan. Berdasarkan laporan ini kami menyajikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti yang diharapkan dan semoga masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicapai oleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa. Untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan dalam penyempurnaan pelaporan kinerja ini di masa yang akan datang.

Besar harapan kami bahwa LKjIP Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 ini dapat memenuhi akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan dan meridhoi upaya kita ke depan untuk membangun Kabupaten Sumbawa ini dengan lebih gemilang yang berkeadaban.